



# Jurnal Penelitian

# POLITIK

Vol.14, No.2, Desember 2017

## DEMOKRASI, HAM DAN MILITER

- Fenomena *Post Democracy Party* di Indonesia: Kajian atas Latar Belakang, Karakteristik dan Dampaknya
- Pengawasan Intelijen Demokratik sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran HAM
- Polisi Sipil (*Civillian Police*) dalam Reformasi Polri: Upaya & Dilema antara Penegakan HAM dan Fungsi Kepolisian
- Kebijakan Keamanan Maritim di Perbatasan Indonesia: Kasus Kejahatan di Laut Sulawesi – Laut Sulu
- Poros Maritim dan Tantangan Laut Tiongkok Selatan
- Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme di Indonesia
- Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban pada Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Respon Pemerintah dalam Menghadapi Perkembangan dan Pengaruh Gerakan *Islamic State* di Indonesia

### RESUME PENELITIAN

- Perempuan Kepala Daerah dalam Jejaring Oligarki Lokal
- Faksi dan Konflik Internal Partai-Partai Politik di Indonesia Era Reformasi

### REVIEW BUKU

- *Taking Religion more Seriously: Beyond Secular Assumption in Studying Religion and Politics in Indonesia*

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 14	No. 2	Hlm. 109-290	Jakarta, Desember 2017	ISSN 1829-8001
------------------------------	---------	-------	--------------	---------------------------	-------------------

**Jurnal  
Penelitian Politik**



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

**Mitra Bestari**

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)  
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)  
Dr. C.P.F. Luhulima (*Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN dan Eropa*)  
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)  
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)  
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)  
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)  
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)  
Dra. Ratna Shofi Inayati, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)

**Penanggung Jawab  
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI  
Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si

**Dewan Redaksi**

Firman Noor, Ph.D (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)  
Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)  
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)  
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)  
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

**Redaksi Pelaksana**

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)  
Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

**Sekretaris Redaksi**

Esty Ekawati, S.IP., M.IP  
Yusuf Maulana, SAP

**Produksi dan Sirkulasi**

Adiyatnika, A.Md  
Prayogo, S.Kom  
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

**Alamat Redaksi**

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710  
Telp/Faks. (021) 520 7118, *E-mail*: penerbitan.p2p@gmail.com  
*Website*: www.politik.lipi.go.id | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

**ISSN**

1829-8001  
Terakreditasi No. 726/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

## DAFTAR ISI

Daftar Isi		i–ii
Catatan Redaksi		iii–iv
Artikel		
	• <b>Fenomena <i>Post Democracy Party</i> di Indonesia: Kajian Atas Latar Belakang, Karakteristik dan Dampaknya</b> <i>Firman Noor</i>	109–125
	• <b>Pengawasan Intelijen Demokratik Sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran HAM</b> <i>Sri Yanuarti</i>	127–147
	• <b>Polisi Sipil (<i>Civillian Police</i>) dalam Reformasi Polri: Upaya &amp; Dilema Antara Penegakan HAM dan Fungsi Kepolisian</b> <i>Sarah Nuraini Siregar</i>	149–164
	• <b>Kebijakan Keamanan Maritim di Perbatasan Indonesia: Kasus Kejahatan di Laut Sulawesi – Laut Sulu</b> <i>Ismah Rustam</i>	165–181
	• <b>Poros Maritim dan Tantangan Laut Tiongkok Selatan</b> <i>Deasy Silvyia Sari</i>	183–196
	• <b>Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme di Indonesia</b> <i>Diandra Megaputri Mengko</i>	197–208
	• <b>Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban pada Pengadilan Hak Asasi Manusia</b> <i>Yustina Trihoni Nalesti Dewi</i>	209–226
	• <b>Respon Pemerintah dalam Menghadapi Perkembangan dan Pengaruh Gerakan Islamic State di Indonesia</b> <i>Novie Lucky Andriyani dan Feriana Kushindarti</i>	227–242
Resume Penelitian	• <b>Perempuan Kepala Daerah dalam Jejaring Oligarki Lokal</b> <i>Atika Nur Kusumaningtyas, dkk</i>	243–264
	• <b>Faksi dan Konflik Internal Partai-Partai Politik di Indonesia Era Reformasi</b> <i>Aisah Putri Budiatri, dkk</i>	265–279
Review Buku	• <b><i>Taking Religion More Seriously: Beyond Secular Assumption in Studying Religion and Politics in Indonesia</i></b> <i>Gde Dwitya Arief Metera</i>	281–288
Tentang Penulis		289–290
Pedoman Penulisan		291–295

## CATATAN REDAKSI

Reformasi menjadi jembatan perubahan kehidupan sosial politik yang baru di Indonesia. Setelah lebih dari satu dekade reformasi, nyatanya beragam persoalan terkait demokrasi masih menjadi pekerjaan rumah yang tak mudah diselesaikan, tak terkecuali dalam aspek hak asasi manusia dan militer.

*Jurnal Penelitian Politik* nomor ini menyajikan delapan artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan Demokrasi, HAM dan militer. Artikel pertama yang ditulis oleh Firman Noor, ” **Fenomena Post Democracy Party Di Indonesia: Kajian Atas Latar Belakang, Karakteristik dan Dampaknya**”, memperlihatkan bahwa saat ini beberapa partai di Indonesia memang memiliki karakter partai *post democracy*. Namun, secara umum karakter itu bukan merupakan sesuatu hal yang permanen mengingat cenderung berpotensi semakin luntur seiring dengan makin lamanya partai-partai itu berkecimpung dalam kehidupan politik riil. Kehadiran partai berkarakter *post-democracy* itu ditengarai merupakan dampak dari kondisi kehidupan politik yang sudah bergeser dari bentuk demokrasi yang dianggap ideal.

Artikel berikutnya, ”**Pengawasan Intelijen Demokratik sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran HAM**”. Artikel yang ditulis oleh Sri Yanuarti ini membahas mengenai Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi negara adalah tidak adanya pengawasan intelijen yang dilakukan secara demokratis. Tulisan ini juga membahas mengenai contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi dari masa ke masa di Indonesia.

Persoalan reformasi Polri juga menjadi bagian yang dibahas pada edisi ini dalam artikel ”**Polisi Sipil (Civillian Police) dalam Reformasi Polri : Upaya & Dilema Antara Penegakan HAM dan Fungsi Kepolisian**” yang ditulis oleh Sarah Nuraini Siregar. Artikel ini mengkaji dan menganalisa fungsi Polri sebagai Polisi Sipil selama masa reformasi dalam konteks Reformasi Polri. Analisa ini disertakan dengan berbagai problematika

yang dihadapi Polri, sehingga acapkali membuat posisi Polri menjadi dilematis; antara menjalankan fungsinya dengan ketat namun berkonsekuensi pada isu pelanggaran HAM, atau membuat pilihan-pilihan strategis yang dapat menyokong citra Polri dalam koridor sebagai Polisi Sipil.

Sementara itu, artikel ”**Kebijakan Keamanan Maritim Di Perbatasan Indonesia : Kasus Kejahatan Di Laut Sulawesi – Laut Sulu**” yang ditulis oleh Ismah Rustam. Tulisan ini membahas mengenai kebijakan keamanan maritim pada wilayah Laut Sulawesi – Laut Sulu yang sering kali dihadapkan pada permasalahan kejahatan terutama penyanderaan dan pembajakan kapal. Meski tiga negara; Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah melaksanakan patroli bersama di kedua perairan namun angka tindak kejahatan di wilayah tersebut masih tergolong tinggi.

Artikel selanjutnya membahas tentang ”**Poros Maritim Dan Tantangan Laut Tiongkok Selatan**” yang ditulis oleh Deasy Silvyia Sari. Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji strategi Poros Maritim Indonesia dalam menghadapi perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer di Laut Tiongkok Selatan. Artikel keenam yang ditulis oleh Diandra M. Mengko berjudul ”**Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme Di Indonesia**” membahas mengenai argumen bahwa pelibatan TNI pada derajat dan konteks tertentu memang dapat mendukung upaya penanggulangan terorisme. Namun memberikan kewenangan TNI yang setara dengan Polri (dalam menangani aksi terorisme) justru akan menimbulkan berbagai persoalan baru: kontra-produktif terhadap upaya kontra-terorisme dan pembangunan profesionalisme militer, serta menempatkan kehidupan demokrasi Indonesia dalam resiko.

Persoalan pengadilan hak asasi manusia juga menjadi sorotan dalam edisi ini melalui artikel yang ditulis oleh Yustina Trihoni Nalesti Dewi dengan judul ”**Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban Pada Pengadilan Hak Asasi Manusia**”. Artikel ini menguraikan perlunya pembenahan perlindungan saksi

terutama dalam konteks legislasi untuk mendukung kemampuannya berkontribusi bagi terciptanya *fair trial* Pengadilan HAM. Artikel terakhir yang ditulis oleh Novie Lucky Andriyani dan Feriana Kushindari dengan judul **“Respon Pemerintah Dalam Menghadapi Perkembangan Dan Pengaruh Gerakan Islamic State Di Indonesia”**. Artikel ini membahas mengenai perkembangan Negara Islam di Indonesia dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kondisi Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga akan menerapkan teori pengambilan keputusan untuk membahas bagaimana pemerintah Indonesia menanggapi kesepakatan dan menghadapi pengaruh Negara Islam di Indonesia.

Selain delapan artikel, nomor ini juga menghadirkan dua ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2016. Naskah pertama ditulis oleh Atika Nur Kusumaningtyas, **“Perempuan Kepala Daerah Dalam Jejaring Oligarki Lokal”**. Penelitian ini menemukan bahwa perempuan kepala daerah yang berasal dari kekerabatan yang kuat, adalah bagian dari oligarki lokal. Sebagai akibatnya, mereka mengalami kesulitan menjaga independensi terhadap para oligark, yang megakibatkan lemahnya kinerja dalam mendorong demokratisasi lokal dan kepentingan praktis gender di daerahnya

Naskah kedua, **“Faksi Dan Konflik Internal Partai-Partai Politik di Indonesia Era Reformasi”**, ditulis oleh Aisah Putri Budiatri. Riset ini menemukan ada beberapa hal yang menjadi penyebab konflik diantaranya ideologi partai, melembaganya kepemimpinan partai yang personal dan oligarkis, serta koalisi partai yang cair, inefektivitas aturan hukum formal, serta kombinasi sistem proporsional terbuka, sistem pemilu langsung dan sistem multipartai ekstrim. Konflik adalah problem yang memiliki dampak buruk bagi partai karena diantaranya mampu mengganggu rekrutmen partai serta kinerja elektoralnya. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan mengatasi konflik adalah suatu kepatutan.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan *review* buku karya Veri R. Hadiz dengan judul **“Islamic Populism in Indonesia and the Middle East”** dan Michael Buehler berjudul **“The Politics of Sharia Law: Islamic Activist and the State in Democratizing Indonesia”** yang ditulis oleh Gde Dwitya Arief Metera. Dua publikasi ini telah memajukan literatur tentang agama dan politik di Indonesia dengan menawarkan pendekatan analitis baru dibandingkan dengan pendekatan kultural dan institusional yang selama ini dominan. Buku dari Buehler secara khusus telah lebih baik menjawab tantangan dari Benedict Anderson untuk memahami motif unik dari politik kaum religius di Indonesia dibandingkan dengan buku dari Hadiz. Hadiz, di sisi lain, masih melihat Indonesia sebagai kasus kegagalan dari perjuangan politik kaum Islamis sebagai akibat dari memfokuskan perhatian pada lemahnya kinerja elektoral dari aktor-aktor Islam politik sebagai indikator. Namun, kedua buku seyogyanya disambut dengan hangat oleh para pelajar studi agama dan politik di Indonesia.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya *Jurnal Penelitian Politik* nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai Perkembangan Demokrasi, HAM dan militer.

Selamat membaca.

**Redaksi**

**DDC: 321.8**  
**Firman Noor**

**FENOMENA *POST DEMOCRACY PARTY*  
DI INDONESIA: KAJIAN ATAS LATAR  
BELAKANG, KARAKTERISTIK DAN  
DAMPAKNYA**

**Jurnal Penelitian Politik**  
**Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 109-125**

Di era demokrasi saat ini beberapa partai di Indonesia nampak memiliki karakter unik dimana tidak tumbuh dari masyarakat dan bukan pula merupakan sebuah institusi yang awalnya adalah perantara antara anggota parlemen dengan masyarakat. Kehadiran partai berkarakter *post-democracy* itu sendiri ditengarai merupakan dampak dari kondisi kehidupan politik yang sudah bergeser dari bentuk demokrasi yang dianggap ideal. Dengan menggunakan pisau analisis dari Colin Crouch artikel ini membedah latar belakang dan karakter partai-partai di Indonesia saat ini, serta menguji sejauh mana partai-partai tersebut dapat disebut sebagai *post-democracy*. Pada bagian akhir artikel ini akan membahas berbagai potensi dampak yang ditimbulkan. Secara umum, tulisan ini memperlihatkan bahwa saat ini beberapa partai di Indonesia memang memiliki karakter partai *post democracy*. Namun, secara umum karakter itu bukan merupakan sesuatu hal yang permanen mengingat cenderung berpotensi semakin luntur seiring dengan makin lamanya partai-partai itu berkecimpung dalam kehidupan politik riil.

**Kata Kunci:** Post-Democracy, Partai Politik, Oligarki, Regulasi.

**DDC: 355.00092**  
**Sri Yanuarti**

**PENGAWASAN INTELIJEN  
DEMOKRATIK SEBAGAI INSTRUMEN  
PENCEGAHAN PELANGGARAN HAM**

**Jurnal Penelitian Politik**  
**Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 127-147**

Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi negara adalah tidak adanya pengawasan intelijen yang dilakukan secara demokratis. Khusus pada negara-negara yang berada pada masa transisi dari rejim otoriter ke rejim demokratik, pengawasan institusi intelijen secara demokratis menjadi keharusan. Hal ini dikarenakan, institusi-institusi intelijen pada masa lalu (rezim otoriter) biasanya berfungsi untuk melindungi pemimpin yang otoriter atau menjadi alat represif bagi masyarakatnya. Akibatnya; (1) Institusi intelijen lebih melayani kepentingan politik daripada pembuatan kebijakan; (2) Unit intelijen yang ditetapkan ditujukan untuk tujuan politik tertentu; (3) Petugas intelijen atau kebijakan intelijen diarahkan, diatur oleh kepentingan politik, atau partai politik, yang berafiliasi pada institusi intelijen.

Di Indonesia pengawasan intelijen secara demokratis menjadi penting mengingat sejarah intelijen pada masa lalu banyak yang disalahgunakan untuk memproteksi rezim yang ada, selain itu praktik intelijen juga dilakukan secara bebas karena mereka memiliki hak kekebalan atau *immunity* dengan dalih bahwa prinsip pekerjaan intelijen adalah kerahasiaan. Selain itu politisasi institusi intelijen pada masa lalu sangat tinggi

Di masa Soeharto, praktik intelijen 'hitam' secara eksplisit dijalankan untuk menghadapi ancaman terhadap penguasa politik. Fokus dari

kegiatan intelijen pada saat itu ditujukan untuk menghancurkan komunisme di Indonesia. Dengan justifikasi tersebut operasi dalam skala besar dijalankan. Hal ini berlanjut selama tiga puluh tahun di mana kegiatan intelijen yang menjustifikasi pelanggaran HAM tersebut lebih ditujukan untuk mengatasi ancaman yang datang dari dalam negeri. Deretan kasus yang terjadi mulai dari operasi militer di Aceh, Timor Timur, Papua, peristiwa Malari 1974, Tanjung Priuk 1984, kasus Penembakan Misterius (Petrus) di tahun 1980an, diikuti dengan kasus penghilangan aktivis sepanjang tahun 1997-1998 menunjukkan wajah gelap intelijen yang saat itu dijadikan instrumen bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya.

**Kata Kunci :** Intelijen, Pengawasan, Demokrasi, Pelanggaran HAM

---

**DDC: 361.24**

**Sarah Nuraini Siregar**

**POLISI SIPIL (*CIVILLIAN POLICE*)  
DALAM REFORMASI POLRI:  
UPAYA & DILEMA ANTARA  
PENEGAKAN HAM DAN FUNGSI  
KEPOLISIAN**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 149-164**

Paradigma sebagai Polisi Sipil adalah perubahan paradigma besar Polri. Ini bukan pekerjaan mudah karena identitas Polri saat masih menjadi bagian dari ABRI tidak jauh dari watak militeristik dan sarat dengan pola tindak kekerasan. Tulisan ini mencoba mengkaji dan menganalisa fungsi Polri sebagai Polisi Sipil selama masa reformasi dalam konteks Reformasi Polri. Analisa ini disertakan dengan berbagai problematika yang dihadapi Polri, sehingga acapkali membuat posisi Polri menjadi dilematis; antara menjalankan fungsinya dengan ketat namun berkonsekuensi pada isu pelanggaran HAM, atau membuat pilihan-pilihan strategis yang dapat menyokong citra Polri dalam koridor sebagai Polisi Sipil.

**Kata Kunci :** Polisi Sipil, Reformasi Polri, Isu Pelanggaran HAM

---

**DDC: 320.12**

**Ismah Rustam**

**KEBIJAKAN KEAMANAN MARITIM  
DI PERBATASAN INDONESIA : KASUS  
KEJAHATAN DI LAUT SULAWESI –  
LAUT SULU**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 165-181**

Tulisan ini membahas mengenai kebijakan keamanan maritim pada wilayah Laut Sulawesi – Laut Sulu yang sering kali dihadapkan pada permasalahan kejahatan terutama penyanderaan dan pembajakan kapal. Meski tiga negara; Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah melaksanakan patroli bersama di kedua perairan namun angka tindak kejahatan di wilayah tersebut masih tergolong tinggi. Pendekatan yang ingin dilihat dalam tulisan ini yaitu pembentukan kerja sama trilateral, dimana pemerintah perlu melakukan pendekatan diplomatik dan membentuk rezim kerjasama yang cukup mengikat. Indonesia selaku negara yang memiliki kepentingan teritorial cukup besar di wilayah tersebut harus menginisiasi tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan yang telah dilaksanakan di antara tiga negara. Layaknya Selat Malaka, alur laut wilayah perbatasan Laut Sulawesi - Laut Sulu termasuk jalur pelayaran yang berbahaya. Berbagai inisiatif rezim di Selat Malaka membuat penurunan angka kriminalitas dan meningkatkan angka keselamatan navigasi. Sementara di wilayah perbatasan Laut Sulawesi – Laut Sulu belum nampak rezim yang cukup kuat dalam pengamanan lautnya.

**Kata Kunci :** keamanan maritim, Laut Sulawesi – Laut Sulu, rezim, wilayah teritorial

---

**DDC: 959.164**

**Deasy Silvy Sari**

**POROS MARITIM DAN TANTANGAN  
LAUT TIONGKOK SELATAN**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 183-196**

Perlombaan reklamasi pulau sedang berlangsung di Laut Tiongkok Selatan sejak lima belas tahun terakhir. Perlombaan reklamasi dilakukan oleh pemerintah negara-

negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang mengembangkan *Fiery Cross Reef* seluas 3.000m<sup>2</sup>, Vietnam yang mengembangkan *Spratly Island* seluas 550 m<sup>2</sup>, Malaysia yang mengembangkan *Swallow Reef* seluas 1.368m<sup>2</sup>, Filipina yang mengembangkan *Thitu Island* seluas 1.000m<sup>2</sup>, dan Taiwan yang mengembangkan *Itu Aba* seluas 1.195m<sup>2</sup>. Perlombaan reklamasi pulau tersebut akan berpengaruh pada zona ekonomi eksklusif (ZEE) masing-masing negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Upaya penyelesaian sengketa di Laut Tiongkok Selatan telah diupayakan baik secara bilateral, maupun regional melalui ASEAN. Serangkaian dokumen kesepakatan telah dihasilkan antara negara-negara anggota ASEAN dengan Pemerintah RRT namun belum mampu mengurangi ego pihak bersengketa untuk menghentikan reklamasi. Terlebih, perlombaan reklamasi pulau disertai pengembangan dan peningkatan kapabilitas militer masing-masing negara bersengketa dari sisi kuantitas dan kualitas.

Dalam desain Poros Maritim Dunia yang digaungkan Pemerintah Indonesia sebagai rencana pembangunan wilayah maritim, Pemerintah Indonesia perlu menata strategi guna mengimbangi perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer tersebut. Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji strategi Poros Maritim Indonesia dalam menghadapi perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer di Laut Tiongkok Selatan. Penulis melakukan studi literatur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan interpretasi data, serta merancang strategi Poros Maritim Indonesia dengan menggunakan *Regional Security Complex Theory* (RSCT). Pemerintah Indonesia perlu mendesain strategi *outward looking* dalam desain Poros Maritim Indonesia guna menangkal strategi negara-negara lain yang mampu mengancam ketahanan NKRI, khususnya terkait dengan perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer di Laut Tiongkok Selatan.

**Kata kunci:** Indonesia, Laut Tiongkok Selatan, Poros Maritim, *Regional Security Complex Theory* (RSCT),

---

**DDC: 363.3**

**Diandra Megaputri Mengko**

## **PELIBATAN TNI DALAM KONTRA TERORISME DI INDONESIA**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 197-208**

Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menanggulangi aksi teror di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Apabila sebelum reformasi 1988, ABRI/TNI menjadi garda terdepan dalam menghadapi aksi teror, pasca reformasi 1998 dan pemisahan TNI-Polri, hal ini menjadi domain dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sejak saat itu TNI berperan sebagai garda pendukung. Namun wacana untuk mengembalikan kewenangan TNI dalam menghadapi aksi teror di tanah air terus muncul. Tulisan ini mengajukan argumen bahwa pelibatan TNI pada derajat dan konteks tertentu memang dapat mendukung upaya penanggulangan terorisme. Namun memberikan kewenangan TNI yang setara dengan Polri (dalam menangani aksi terorisme) justru akan menimbulkan berbagai persoalan baru: kontra-produktif terhadap upaya kontra-terorisme dan pembangunan profesionalisme militer, serta menempatkan kehidupan demokrasi Indonesia dalam resiko.

**Kata kunci:** Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Militer, Terorisme

---

**DDC: 362.8**

**Yustina Trihoni Nalesti Dewi**

## **PENGUATAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PADA PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 209-226**

Pengadilan HAM Indonesia untuk Timor-Timur, Tanjung Priok, dan Abepura yang sudah menangani 18 perkara, tidak kredibel karena mengandung banyak cacat dan kelemahan serta mengingkari standar kemanusiaan. Salah satu alasannya karena Pengadilan HAM tidak dapat menjamin perlindungan saksi dari ancaman dan tekanan. Padahal perlindungan saksi sangat



penting terutama dalam pelanggaran berat HAM karena pelaku biasanya mempunyai otoritas, kekuasaan dan sumber daya untuk menghilangkan barang bukti, mempengaruhi aparat penegak hukum maupun mengintimidasi saksi-saksi. Sedangkan saksi biasanya pihak lemah terutama dalam relasi kekuasaan dengan terdakwa. Paper ini hendak menguraikan perlunya pembenahan perlindungan saksi terutama dalam konteks legislasi untuk mendukung kemampuannya berkontribusi bagi terciptanya *fair trial* Pengadilan HAM.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Pengadilan, Korban

---

**DDC: 363.3**

**Novie Lucky Andriyani dan Feriana Kushindarti**

### **RESPON PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN DAN PENGARUH GERAKAN ISLAMIC STATE DI INDONESIA**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 227-242**

Deklarasi “Khalifah” yang diungkapkan oleh Abu Bakar al Bagdadi pada bulan Oktober 2014, yang dikenal sebagai Negara Islam (yang sebelumnya dikenal sebagai Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS) adalah sebuah kelompok organisasi jihad yang bertujuan untuk membentuk sebuah Negara Islam (Kekhalifahan) di wilayah ini. Dampak tindakan ISIS menyebabkan eksistensi Negara Islam mendapat perhatian dari negara lain dan pelaku lainnya dalam hubungan internasional. beberapa dai mereka memberikan dukungannya kepada Negara Islam sementara beberapa lainnya menentangnya. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menghadapi kekerasan dan ancaman yang disebabkan oleh gerakan Islam di beberapa wilayah di Indonesia. Dari latar belakang gerakan di Indonesia, pergerakan ISIS mendapatkan perhatian dari organisasi Islam Indonesia dan mereka mulai menyatakan dukungan mereka terhadap Negara Islam. Hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia khawatir karena usaha yang dilakukan militan di Indonesia untuk memobilisasi masyarakat Indonesia bergabung dalam jihad di Irak dan Suriah. Dari pembahasan di atas, artikel

ini akan membahas tentang perkembangan Negara Islam di Indonesia dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kondisi Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga akan menerapkan teori pengambilan keputusan untuk membahas bagaimana pemerintah Indonesia menanggapi kesepakatan dan menghadapi pengaruh Negara Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memberikan perhatian kepada konsep kekhalifahan global yang diperkenalkan oleh Negara Islam. Ancaman Negara Islam yang menyebar di seluruh Indonesia mendorong pemerintah Indonesia untuk merespon ideologi Negara Islam dan tindakan barbarinya, tetapi juga tindakan Negara Islam dalam subversi nasionalisme.

**Kata Kunci:** Indonesia, pengaruh, Negara Islam, respon

---

**DDC: 321.5**

**Atika Nur Kusumaningtyas**

### **PEREMPUAN KEPALA DAERAH DALAM JEJARING OLIGARKI LOKAL**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 243-264**

“Kerabatan” adalah salah satu faktor penting di balik kemunculan para perempuan kepala daerah. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menganalisis dua perempuan kepala daerah yaitu Airin Rachmi Diany di Tangerang Selatan dan Anna Sophanah di Indramayu, yang muncul dengan faktor kekerabatan yang kuat. Penelitian ini difokuskan untuk mengungkapkan kondisi sosio-politik, ekonomi, dan historis yang memfasilitasi kemunculan keduanya. Data tambahan yang lain diperoleh dengan kuesioner untuk menilai sejauh mana kinerjanya dalam mendorong demokratisasi lokal termasuk kepentingan praktis gender. Penelitian ini menemukan bahwa perempuan kepala daerah yang berasal dari kekerabatan yang kuat, adalah bagian dari oligarki lokal. Sebagai akibatnya, mereka mengalami kesulitan menjaga independensi terhadap para oligark, yang megakibatkan lemahnya kinerja dalam mendorong demokratisasi lokal dan kepentingan praktis gender di daerahnya.

**Kata Kunci:** perempuan kepala daerah, faktor kekerabatan, demokratisasi lokal, kepentingan praktis gender.

---

**DDC: 324.2598**

**Aisah Putri Budiatri**

**FAKSI DAN KONFLIK INTERNAL  
PARTAI-PARTAI POLITIK  
DI INDONESIA ERA REFORMASI**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 265-279**

Konflik internal dan perpecahan partai merupakan persoalan pelik yang pernah dialami oleh hampir semua partai yang berkuasa di parlemen Indonesia selama era reformasi. Konflik tak terhindarkan meskipun Undang-Undang Partai Politik telah mengatur secara khusus mengenai konflik partai dan cara penyelesaiannya. Riset kualitatif ini menemukan ada beberapa hal yang menjadi penyebab konflik diantaranya ideologi partai, melembaganya kepemimpinan partai yang personal dan oligarkis, serta koalisi partai yang cair, inefektivitas aturan hukum formal, serta kombinasi sistem proporsional terbuka, sistem pemilu langsung dan sistem multipartai ekstrim. Konflik adalah problem yang memiliki dampak buruk bagi partai karena diantaranya mampu mengganggu rekrutmen partai serta kinerja elektoralnya. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan mengatasi konflik adalah suatu kepatutan.

**Kata Kunci:** Faksi, Partai Politik, Konflik, Reformasi

---

**DDC: 297.272**

**Gde Dwitya Arief Metera**

**MELIHAT AGAMA SECARA LEBIH  
SERIUS: MELAMPAUI ASUMSI  
SEKULAR DALAM MENELITI AGAMA  
DAN POLITIK DI INDONESIA**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 281-288**

Review ini membedah dua buku penting dari Vedi Hadiz dan Michael Buehler berjudul masing-masing Islamic Populism in Indonesian

and the Middle East dan The Politics of Shari'a Law: Islamist Activist and the State in Democratizing Indonesia. Dua publikasi ini telah memajukan literature tentang agama dan politik di Indonesia dengan menawarkan pendekatan analitis baru dibandingkan dengan pendekatan kultural dan institusional yang selama ini dominan. Buku dari Buehler secara khusus telah lebih baik menjawab tantangan dari Benedict Anderson untuk memahami motif unik dari politik kaum religius di Indonesia dibandingkan dengan buku dari Hadiz. Hadiz, di sisi lain, masih melihat Indonesia sebagai kasus kegagalan dari perjuangan politik kaum Islamis sebagai akibat dari memfokuskan perhatian pada lemahnya kinerja elektoral dari aktor-aktor Islam politik sebagai indicator. Namun, kedua buku seyogyanya disambut dengan hangat oleh para pelajar studi agama dan politik di Indonesia.

**Kata kunci:** Politik kaum Islamis, Politik Indonesia, Populisme Islam, Perda Sharia, Demokratisasi.

DDC: 321.8  
Firman Noor

**THE POST DEMOCRACY PARTY  
PHENOMENON IN INDONESIA:  
A STUDY ON THE BACKGROUNDS,  
CHARACTERISTICS, AND IMPACTS**

*Journal of Political Research*  
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 109-125

*In the Indonesia current democracy situation, several parties emerges with their uniqueness, neither as parties that growth from the society, nor as a mediator between Members of Parliament and the people. Their presence is believed as an impact of transformation that becomes distance from ideal democracy in the nowadays political condition. By mainly implementing Colin Crouch's analytical frame work, this article discusses the backgrounds and characteristics some Indonesia contemporary parties, and also examines to what extent these parties could be categorized as a "post democracy party". In the last part of the discussion, this article offers a perspective on the possible impacts of the presence of this phenomenon. In general, this article indicates that some post democracy party's characteristic are relevant and becoming parties' characteristic. However, such characteristics are not permanent and tend to be fade away. This situation would potentially happen in line with the intensity of those parties' involvement in the real political life.*

**Keywords:** Post-Democracy, Political Party, Oligarchy, Regulation.

DDC: 355.00092  
Sri Yanuarti

**DEMOCRATIC INTELIJEN SUPERVISION  
AS INSTRUMENTS PREVENTION OF  
VIOLATION OF HUMAN RIGHTS**

*Journal of Political Research*  
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 127-147

*One of the causes of human rights violations committed by state institutions is the absence of democratic intelligence oversight. Especially in countries in transition from authoritarian regimes to democratic regimes, democratic oversight of intelligence institutions is imperative. This is because, the intelligence institutions of the past (authoritarian regimes) usually serve to protect the authoritarian leader or become a repressive tool for his society. As a result; (1) Intelligence institutions serve more political interests than policy-making; (2) The established intelligence unit is intended for a particular political purpose; (3) Intelligence officers or intelligence policies are directed, governed by political interests, or political parties, affiliated with intelligence agencies.*

*In Indonesia democratic oversight of intelligence is important as the history of intelligence in the past has been widely misused to protect the existing regime, besides the practice of intelligence is also done freely because they have immunity rights under the pretext that the principle of intelligence work is confidentiality. In addition, the politicization of intelligence institutions in the past is very high*

*In the Soeharto era, the 'black' intelligence practice was explicitly pursued to deal with threats to political rulers. The focus of intelligence activities at the time was aimed at destroying communism in Indonesia. With the justification of these operations on a large scale*

run. This continued for thirty years in which intelligence activities that justify human rights abuses are more aimed at addressing threats coming from within the country. The sequence of cases that occurred from military operations in Aceh, East Timor, Papua, Malari 1974, Tanjung Priuk 1984, the mysterious shooting case (Peter) in the 1980s, followed by cases of activist disappearance during 1997- 1998 show the dark face of intelligence that when it is used as an instrument for the ruler to perpetuate his power.

**Keywords:** Intelijen, Monitoring, Democracy, Human Rights Violations

---

**DDC: 361.24**

**Sarah Nuraini Siregar**

**CIVILLIAN POLICE IN POLICE REFORM: EFFORTS & DILEMMAS BETWEEN ENFORCING HUMAN RIGHTS AND POLICE FUNCTIONS**

**Journal of Political Research**

**Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 149-164**

Civillian Police is a major paradigm change for Polri. This change is not easy because when the police were still part of ABRI, this institution is full of militaristic and violent character. This paper will examine and analyze the function of the Police as a Civillian Police during the reform period within the scope of the Police Reform. This analysis will explain the problems faced by the Police, so that the position of Polri becomes dilemmatic; between carrying out its functions but has implications on the issue of human rights violations, or making strategic choices that can support the image of the Police in the corridor as Civillian Police.

**Keywords:** Civillian Police, Police Reform, human rights violations

---

**DDC: 320.12**

**Ismah Rustam**

**MARITIME SECURITY POLICY IN INDONESIA'S BOUNDARY: CASES OF CRIMINAL IN SEA - SULU SEA**

**Journal of Political Research**

**Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 165-181**

This paper discusses the maritime security policy on the Sulawesi Sea - Sulu Sea which is often faced with crime issues especially hostage taking and hijacking. Though three countries; Indonesia, Malaysia and the Philippines have joint patrols in both waters but the crime rate in the region is still relatively high. The approach to be seen in this paper is the formation of a trilateral cooperation, in which the government needs to take a diplomatic approach and establish a binding cooperation regime. Indonesia as a country with significant territorial interests in the region must initiate follow-up of meetings that have been held between the three countries. Like the Malacca Strait, the sea channel of the Sulawesi Sea border - Sulu Sea includes a dangerous voyage route. The various regime initiatives in the Malacca Strait have reduced crime rates and increased the number of navigational safety. While in the border region of Sulawesi Sea - Sulu Sea has not seen the regime strong enough in marine security.

**Keywords:** maritime security, Sulawesi Sea - Sulu Sea, regime, territorial territory

---

**DDC: 959.164**

**Deasy Silvya Sari**

**MARITIME NEXUS AND THE CHALLENGE OF SOUTH CHINA SEA**

**Journal of Political Research**

**Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 183-196**

The island reclamation race has been taking place in the South China Sea since fifteen years ago. The reclamation race was carried out by the governments of the People's Republic of China (PRC), Vietnam, Malaysia, Philippines, and Taiwan. The island reclamation will affect the exclusive economic zone (ZEE) of each ASEAN members, including Indonesia. Dispute resolution efforts have been sought both bilaterally and regionally. A series

of agreement have been done, but it have not been able to reduce the ego of disputed parties to stop reclamation. Moreover, the reclamation of the island accompanied the development and enhancement of military capability of each disputed country in terms of quantity and quality.

In the design of the World Maritime Nexus echoed by Indonesian Government as a maritime development plan, the Indonesian Government needs to set a strategy to offset the island reclamation and military capability. This paper intends to elaborate the strategy of Indonesian Maritime nexus in the face of island reclamation and military capability in the South China Sea. The author conducted a literature study to collect, analyze, and interpret datas, as well as to design the strategy of Indonesian Maritime nexus using Regional Security Complex Theory (RSCT). The Indonesian government needs to design an outward looking strategy in the design of the Indonesian Maritime nexus to counteract other countries' strategies that could threaten the resilience of the Unitary Republic of Indonesia, particularly in relation to the island reclamation and military capability in the South China Sea.

**Keywords:** Indonesia, Souths China Sea, Maritime Nexus, Regional Security Complex Theory (RSCT).

---

**DDC: 363.3**

**Diandra Megaputri Mengko**

### **MILITARY INVOLVEMENT IN COUNTER-TERRORISM IN INDONESIA**

*Journal of Political Research*

**Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 197-208**

Indonesian Military (TNI) involvement in counter-terrorism basically has its historical background. Before Indonesian political reform 1998, the military played as a main role in counter-terrorism in both domestic and international context. Along with the Indonesian political reformation in 1998 and the separation of military (TNI) and police (Polri), the problem of terrorism has considered as criminal acts that put the Police to perform as main role and the TNI as supporting role. However, the discourse to restore TNI's authority (as main

role) on counter terrorism continues to emerge. This paper argues that TNI involvement in certain degrees and contexts can indeed support counter-terrorism efforts in Indonesia. However it is important to note that giving the TNI's equal authority with the Police (in counter terrorism) would impacted to serious problems, such as: counter-productive to counter-terorrism efforts and the development of TNI professionalism, or even risk Indonesia's democratic life.

**Keywords:** Indonesian Military (TNI), Indonesian Police (Polri), Military, Terrorism

---

**DDC: 362.8**

**Yustina Trihoni Nalesti Dewi**

### **STRENGTHENING PROTECTION OF WITNESS AND VICTIMS ON THE HUMAN RIGHTS COURT**

*Journal of Political Research*

**Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 209-226**

Indonesia's Human Rights Tribunal for East Timor, Tanjung Priok and Abepura who have handled 18 cases, are not credible because they contain many defects and weaknesses and deny humanitarian standards. One reason is that the Human Rights Court can not guarantee the protection of witnesses from threats and pressure. Whereas the protection of witnesses is particularly important in gross violations of human rights because perpetrators usually have the authority, power and resources to remove evidence, influence law enforcement officers or intimidate witnesses. Whereas witnesses are usually weak parties especially in power relations with defendants. This paper is intended to describe the need to improve the protection of witnesses, especially in the context of legislation to support its ability to contribute to the creation of a fair trial of the Human Rights Court.

**Keywords:** Human Right, Court, Victim

---

**DDC: 363.3**

**Novie Lucky Andriyani and Feriana  
Kushindarti**

**GOVERNMENT RESPONSE IN DEALING  
WITH THE DEVELOPMENT AND  
INFLUENCE OF ISLAMIC STATE  
MOVEMENT IN INDONESIA**

*Journal of Political Research*  
**Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 227-242**

*The self-declared “caliphate” of Abu Bakr al Bagdadi on October 2014, known as The Islamic State (formerly known as the Islamic State of Iraq and Syria or ISIS) is a group of jihadist organization that aims to form an Islamic State (caliphate) over the region. The impact of IS action caused the Islamic State existence gain attention from other countries and actor in international relation. Some of them are giving their support to IS while some others are opposed it. Indonesia has its long history in dealing with violent and threat caused by Islamic movement in some areas. From Indonesian background of movement, the movement of IS gain attention from Indonesian Islamist organizations and they started to declare their support for Islamic state. It worries Indonesian government because of its local militant attempts to mobilise Indonesian people to join jihad in Iraq and Syria. From the discussion mention above, this article will talks about the development of Islamic State in Indonesia and how it affects Indonesia condition. Besides that, the writing will also apply theory on decision making to discuss on how Indonesian government response to deal and face the influence of Islamic State. The research shows that Indonesia gives attention to the concept of a global caliphate which is introduced by IS. The threat of Islamic State that spread around Indonesia motivated Indonesian government to response not only to Islamic States’ ideology and its barbaric actions, but it also to Islamic States’ attempted subversion of Indonesia nationalism.*

**Key words:** *Indonesia, influence, Islamic State, response*

---

**DDC: 321.5**

**Atika Nur Kusumaningtyas**

**FEMALE LOCAL LEADERS IN LOCAL  
OLIGARCHY NETWORK**

*Journal of Political Research*  
**Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 243-264**

*Familial ties is one of the influential factors behind the rise of female local leaders. By using qualitative method this study examined two female local leaders namely Airin Rachmi Diany in Tangerang Selatan and Anna Sophanah in Indramayu, who have emerged by means of familial ties factor. It focuses to reveal the socio-political, economic and historical features that have facilitated their political rise. Additional data was obtained through questionnaires in order to evaluate their performance in enhancing local democratization, including commitment on practical gender interests. This study reveals that the female local leaders, who come from strong familial ties background, are actually part of local oligarch. As consequences, they experienced difficulties in maintaining independency to the local oligarch, which resulted in weak performance to enhance local democratization, as well as, practical gender interests in the region.*

**Keywords:** *female local leader, familial ties, local democratization, practical gender interest.*

---

**DDC: 324.2598**

**Aisah Putri Budiatri**

**INTERNAL FACTION AND CONFLICTS  
OF POLITICAL PARTIES IN INDONESIA  
ERA REFORMATION**

*Journal of Political Research*  
**Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 265-279**

*Internal conflicts and party divisions are complex issues that have been experienced by almost all of big parties in the Indonesia during the reform era. Conflict is inevitable even though the Political Party Law has specifically regulated party conflicts and ways to end the conflicts. This qualitative research finds factors that cause the conflict including party ideologies, the institutionalization of personal and oligarchic party leadership, uninstitutionalized*

party coalitions, the ineffectivity of formal legal rules, and a combination of open proportional systems, direct election systems and extreme multiparty systems. Conflict is a problem that has a negative impact on the party because it can disturb party recruitment and its electoral performance. Therefore, the effort to prevent and resolve the conflict is a essential.

**Keywords:** Faction, Political Party, Conflict, Reformation

---

**DDC: 297.272**

**Gde Dwitya Arief Metera**

**TAKING RELIGION MORE SERIOUSLY:  
BEYOND SECULAR ASSUMPTION IN  
STUDYING RELIGION AND POLITICS IN  
INDONESIA**

*Journal of Political Research*

**Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 281-288**

*This review looks at two important recent publications by leading scholars on Indonesian politics namely Vedi Hadiz's Islamic Populism in Indonesia and the Middle East, and Michael Buehler's The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia. Both publications have advanced*

*the literature analytically by offering new approaches in a literature that is saturated by culturalist and, more recently, institutionalist arguments. Buehler's book, however, is better-equipped in meeting the challenge offered by Benedict Anderson to understand the unique motive of religious politics in Indonesia than Hadiz's book. Buehler has managed to acknowledge the success of Islamist politics in Indonesia in asserting religious laws in the public sphere. Hadiz, by contrast, still treats the case of Indonesia as a case of failure of Islamist politics primarily by relying on the electoral performance of Islamist actors as an indicator. Ultimately, the two publications should be welcomed warmly by the student of religion and politics in Indonesia.*

**Keywords:** Islamist politics, Indonesian politics, Islamic populism, Shari'a bylaws, Democratization.

**RESUME PENELITIAN  
PEREMPUAN KEPALA DAERAH DALAM JEJARING  
OLIGARKI LOKAL**

**RESEARCH SUMMARY  
FEMALE LOCAL LEADERS IN LOCAL OLIGARCHY NETWORK<sup>1</sup>**

**Atika Nur Kusumaningtyas, Kurniawati Hastuti Dewi, Esty Ekawati,  
Fathimah Fildzah Izzati**

Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Email: atika.nur.k@gmail.com

Diterima: 13 Oktober 2017; direvisi: 8 November 2017; disetujui: 29 Desember 2017

**Abstract**

*Familial ties is one of the influential factors behind the rise of female local leaders. By using qualitative method this study examined two female local leaders namely Airin Rachmi Diany in Tangerang Selatan and Anna Sophanah in Indramayu, who have emerged by means of familial ties factor. It focuses to reveal the socio-political, economic and historical features that have facilitated their political rise. Additional data was obtained through questionnaires in order to evaluate their performance in enhancing local democratization, including commitment on practical gender interests. This study reveals that the female local leaders, who come from strong familial ties background, are actually part of local oligarch. As consequences, they experienced difficulties in maintaining independency to the local oligarch, which resulted in weak performance to enhance local democratization, as well as, practical gender interests in the region.*

**Keywords:** *female local leader, familial ties, local democratization, practical gender interest.*

**Abstrak**

“Kerabatan” adalah salah satu faktor penting di balik kemunculan para perempuan kepala daerah. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menganalisis dua perempuan kepala daerah yaitu Airin Rachmi Diany di Tangerang Selatan dan Anna Sophanah di Indramayu, yang muncul dengan faktor kekerabatan yang kuat. Penelitian ini difokuskan untuk mengungkapkan kondisi sosio-politik, ekonomi, dan historis yang memfasilitasi kemunculan keduanya. Data tambahan yang lain diperoleh dengan kuesioner untuk menilai sejauh mana kinerjanya dalam mendorong demokratisasi lokal termasuk kepentingan praktis gender. Penelitian ini menemukan bahwa perempuan kepala daerah yang berasal dari kekerabatan yang kuat, adalah bagian dari oligarki lokal. Sebagai akibatnya, mereka mengalami kesulitan menjaga independensi terhadap para oligark, yang mengakibatkan lemahnya kinerja dalam mendorong demokratisasi lokal dan kepentingan praktis gender di daerahnya.

**Kata Kunci:** perempuan kepala daerah, faktor kekerabatan, demokratisasi lokal, kepentingan praktis gender.

---

<sup>1</sup> Hasil Penelitian Tim Gender&Politik Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2016. Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, M.A (koordinator), Atika Nur Kusumaningtyas, M.Stat, Esty Ekawati, M.IP, dan Fathimah Fildzah Izzati, S.IP.



## Pendahuluan

Secara perlahan, perempuan Indonesia mulai mengambil peran dan posisi penting dalam politik lokal pasca-Orde Baru Soeharto terutama sejak diberlakukannya UU No.32/2004 yang kemudian diganti dengan UU No.8/2015, dan terakhir menjadi UU No.10/2016 tentang pemilihan kepala daerah. Menguatnya faktor kekerabatan (*familial ties*) terutama pada periode 2010-2014 ditandai dengan banyaknya perempuan kepala daerah yang terpilih pada kurun waktu tersebut merupakan istri atau anak dari politisi laki-laki yang lebih dulu menjabat atau memiliki pengaruh kuat di daerahnya.<sup>2</sup>

Fenomena masih kuatnya faktor kekerabatan ini juga ditemukan pada Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut dengan Pilkada) 9 Desember 2015. Sebanyak 12 dari 24 (50%) perempuan kepala daerah terpilih memiliki latar belakang sebagai petahana dan kader partai, disusul dengan perempuan kepala daerah terpilih yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan elite yaitu sebanyak 45,83%.<sup>3</sup> Angka ini jelas menunjukkan bahwa faktor kekerabatan masih menjadi salah satu pintu utama masuknya para perempuan untuk berkompetisi dan memenangkan Pilkada langsung. Pintu tersebut justru diperlebar dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi atas pasal 7 (r) UU No. 8/2015. Dasar keputusan MK adalah bahwa materi dalam Pasal 7 huruf r tersebut terdapat muatan diskriminatif sehingga bertentangan dengan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang memberikan hak yang sama kepada seluruh warga negara untuk menggunakan hak konstitusionalnya, yakni hak untuk dipilih.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Lihat Kurniawati Hastuti Dewi, "Profiles, Statuses and Performance of Female Local Leaders: Impact Study of Direct Local Elections," *Indonesian Feminist Journal Feminist Journal*, Vol.3, No. 1 (2015), hlm.52-54.

<sup>3</sup> Lihat data dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, "Jalan Terjal Perempuan Kepala Daerah Terpilih: Potret Keterpilihan Perempuan dan Tantangan Lahirkan Kebijakan Pro Perempuan".

<sup>4</sup> Republika, "MK Bolehkan Dinasti Politik", 9 Juli 2015, <http://www.republika.co.id/berita/koran/politik-koran/15/07/09/nr7nka31-mk-bolehkan-dinasti->

Adapun dampak dari keputusan tersebut adalah para calon kepala daerah yang memiliki kekerabatan memiliki peluang untuk maju dalam pilkada dan membangun konsolidasi politik. Hal ini menjadi persoalan pelik dalam kaitannya dengan upaya mendorong demokratisasi lokal. Terlebih lagi adanya kecenderungan kekerabatan di sini terkait erat dengan jaringan oligarki di tingkat lokal yang pada dasarnya berkepentingan dalam mempertahankan dan memperluas sumber daya material yang mereka kuasai.

Dalam kajian mengenai desentralisasi, Vedi R. Hadiz dan Richard Robison (2014) menyebutkan bahwa menguatnya desentralisasi yang dicirikan dengan menguatnya oligarki di tingkat lokal, disebabkan oleh perubahan kelembagaan lokal pasca reformasi yang tidak dibarengi dengan perubahan tatanan dari rezim sebelumnya, sehingga memungkinkan oligarki lama bertahan atau membentuk jejaring oligarki baru di tingkat lokal.<sup>5</sup> Hal itu tidak terkecuali pada para perempuan calon kepala daerah yang muncul dalam Pilkada langsung melalui faktor kekerabatan.

Memahami fenomena penting tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menelaah persoalan dengan fokus pada pertanyaan penelitian, sebagai berikut: (1) bagaimanakah kondisi sosio-politik, ekonomi, dan historis yang memungkinkan munculnya perempuan kepala daerah dengan faktor kekerabatan dalam politik lokal di daerahnya?, (2) bagaimana kinerja perempuan kepala daerah dengan faktor kekerabatan yang kuat dalam mendorong demokratisasi lokal, termasuk di dalamnya memperjuangkan kepentingan praktis gender?

Penelitian ini menganalisis kemunculan dua perempuan kepala daerah dengan kekerabatan yang kuat, yaitu Airin Rachmi Diany selaku Walikota Tangerang Selatan dan Anna Sophanah selaku Bupati Indramayu. Pemilihan kedua perempuan ini didasarkan pada pertimbangan karena keduanya memiliki hubungan khusus

---

politik, diakses pada 1 September 2015.

<sup>5</sup> Vedi R. Hadiz dan Richard Robison, "Ekonomi Politik Oligarki dan Pengorganisasian Kembali Kekuasaan di Indonesia," *Prisma*, Vol. 33, No. 1 (2014), hlm. 35-56.

dengan para politisi laki-laki yang lebih dahulu menjabat posisi politik formal, sehingga dapat memfasilitasi kemunculan mereka. Atau jikapun tidak menjabat posisi politik formal, laki-laki tersebut memegang kontrol atas distribusi sumber daya ekonomi politik lokal.<sup>6</sup> Dalam hal ini adalah suami Airin Rachmi Diany, yaitu Tubagus Chaeri Wardana (Wawan), anak dari Chasan Sohib yang merupakan seorang oligark terkuat di Banten, dan suami Anna Sophanah, yaitu Irianto M.S. Syafiuddin (Yance), Bupati Indramayu selama dua periode (2000-2005 dan 2005-2010). Dengan menganalisis kasus kemunculan dua perempuan kepala daerah dengan kekerabatan yang kuat tersebut, tidak hanya akan diperoleh pemahaman mengenai pra kondisi lokal yang memfasilitasi kemunculan mereka, namun juga akan dapat dilihat sejauhmana keduanya mendorong demokratisasi lokal dan kepentingan praktis gender di daerahnya.

### **Kerangka Konseptual**

Penelitian ini menggunakan tiga kerangka konsep yaitu: pra kondisi munculnya perempuan dengan kekerabatan yang kuat, faktor kekerabatan dan oligarki, serta demokratisasi lokal dan kepentingan praktis gender.

### ***Pra Kondisi Munculnya Perempuan dengan Kekerabatan yang Kuat***

Kiprah para perempuan dalam politik lokal di Indonesia muncul secara jelas dalam Pilkada langsung sejak tahun 2005. Kemunculan mereka tidak mengagetkan jika dilihat dalam kerangka besar kiprah para perempuan dalam politik di Asia. Beberapa ilmuwan berusaha memahami faktor-faktor yang memfasilitasi kemunculan dan kiprah politik para perempuan di Asia.

Rounaq Jahan (1987) menganalisis kasus-kasus perempuan politik sebagai pemimpin negara di India (Indira Ghandi), Bangladesh (Hasina Wazed dan Khaleda Zia), Pakistan (Benazir Bhutto), dan Sri Lanka (Sirimavo Bandaranaike) hingga sampai pada kesimpulan bahwa para perempuan politisi ini mampu menduduki posisi

<sup>6</sup> Sesuai definisi oligarki Hadiz dan Robison yang menjadi acuan dalam penelitian ini dan akan diterangkan lebih lanjut.

politik tertinggi di negaranya salah satunya karena mereka memiliki hubungan kuat (dalam bahasa Jahan sebagai “*family connections*”) dengan keluarga laki-laki (ayah atau suami) yang merupakan tokoh politik berpengaruh. “*family connections*” ini memungkinkan perempuan untuk mengatasi berbagai kendala untuk maju dalam politik (seperti kurangnya modal finansial, ketrampilan, pengalaman, jaringan, serta informasi) dan membantu mereka untuk keluar dari kekangan tradisi *pardah*<sup>7</sup> karena mereka dapat mencari patron dari dalam lingkaran keluarganya.<sup>8</sup>

Dalam analisisnya mengenai faktor-faktor di balik kemunculan para perempuan pemimpin politik di Asia Selatan dan Asia Tenggara, Linda K. Richter (1990-1991) juga menyimpulkan bahwa “*familial ties*” atau hubungan kekerabatan dengan keluarga (suami, ayah) yang merupakan politisi laki-laki berpengaruh merupakan faktor di balik kemunculan politik para perempuan tersebut.<sup>9</sup> Senada dengan Richter, Mark R. Thompson (2002-2003) menganalisis sejarah politik para politisi perempuan senior di Asia. Ia menggunakan istilah dinasti politik “*political dynasties*” untuk menjelaskan elemen hubungan kekerabatan yang kuat dengan politisi laki-laki berpengaruh seperti suami atau ayah, sebagai faktor kunci para perempuan pemimpin politik di Asia Tenggara memperoleh kekuasaannya.<sup>10</sup>

Penelitian ini mengacu pada istilah Richter (1990-1991: 528) “*familial ties*” yang diterjemahkan sebagai hubungan kekerabatan sebagai salah satu faktor penting kemunculan para politisi perempuan. Hubungan kekerabatan dalam konteks ini mengacu pada fakta bahwa

<sup>7</sup> Pemisahan gender dan pembatasan gerak fisik perempuan di ranah publik yang umumnya menimpa para perempuan Muslim di Asia Selatan.

<sup>8</sup> Rounaq Jahan, “Women in South Asian Politics,” *Third World Quarterly*, Vol. 9, No. 3 (1987), hlm.. 852-853.

<sup>9</sup> Linda K Richter, “Exploring Theories of Female Leadership in South and Southeast Asia,” *Pacific Affairs*, Vol.63, No. 4 (1990-1991), hlm.. 528.

<sup>10</sup> Mark. R. Thompson, “Female Leadership of Democratic Transition in Asia,” *Pacific Affairs*, Vol. 75, No. 4 (2002-2003), hlm. 538.

para politisi perempuan tersebut memiliki kerabat politisi laki-laki (suami, ayah, mertua, kakak, adik) yang sangat berpengaruh. Mereka juga turut memfasilitasi kemunculan dan kemenangan para perempuan tersebut dalam Pilkada langsung. Kesenambungan tongkat estafet kepemimpinan dari patron laki-laki kepada generasi berikutnya, baik itu istri atau anak perempuannya, melalui mekanisme prosedural Pilkada langsung sebenarnya dapat dikatakan sebagai suatu upaya untuk membangun dinasti politik dan melanggengkan kekuasaan di tingkat lokal. Hal ini lantaran para politisi laki-laki tersebut telah menjabat sebagai kepala daerah sebelumnya. Sesuai aturan pasal 7 (n) UU No.8/2015 bahwa kepala daerah yang sudah menjabat dua kali berturut-turut di suatu daerah, maka yang bersangkutan tidak boleh mencalonkan diri lagi sebagai kepala daerah. Dalam rangka menyasiasi peraturan ini, para petahana mencalonkan istri atau anak perempuan mereka sebagai kepala daerah dalam Pilkada langsung.

Dalam konteks inilah, pada bagian analisis akan menyajikan bagaimana kondisi sosial-politik dan historis lokal di Tangerang Selatan serta di Indramayu yang menggambarkan kondisi yang memungkinkan kemunculan Airin Rachmi Diany dan Anna Sophanah. Selain aspek sosial politik dan historis, aspek ekonomi juga menjadi salah satu hal yang harus dipertimbangkan karena merujuk pada konsep oligarki. Seperti yang diungkapkan Hadiz dan Robison (2013: 35-57), akumulasi kapital atau sumber daya ekonomi secara kolektif menjadi salah satu elemen pembentuk oligarki.

### ***Faktor Kekeabatan dan Oligarki***

Dalam menjelaskan konteks desentralisasi dan oligarki di tingkat lokal, Vedi R Hadiz dan Richard Robison menggunakan kerangka konsep ekonomi politik. Melalui pendekatan neo-Marxis, Hadiz dan Robison mendefinisikan oligarki sebagai hasil dari kondisi kapitalisme lanjutan di wilayah pinggiran.

Konsep oligarki menurut Hadiz dan Robison tidak semata dilihat pada sumber daya material (ekonomi), tetapi juga berkaitan erat dengan relasi kekuasaan (kuasa politik). Hadiz dan

Robison memandang oligarki sebagai suatu sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan terkonsentrasinya kekayaan dan otoritas serta perlindungan kolektif terhadap keduanya.<sup>11</sup> Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa berdasarkan pandangan Hadiz dan Robison, oligarki membentuk suatu jejaring kolektif dengan akumulasi sumber daya material (ekonomi) yang melimpah dan juga berkuasa secara politik. Bagi Hadiz dan Robison, sebagaimana diuraikan oleh Ford dan Pepinsky, apa yang fundamental dari oligarki ialah sifat kolektif dari oligarki serta hubungan yang saling berkait antara konflik atas kekayaan dan otoritas politik.<sup>12</sup>

Terkait dengan itu, desentralisasi yang muncul paska Orde Baru juga menjadi konteks dari teori oligarki yang dibangun oleh Hadiz dan Robison. Mereka memandang bahwa desentralisasi telah menjadi jalan yang efektif bagi kekuasaan politik lama (dari rezim Orde Baru) untuk memperluas jejaring mereka hingga ke tingkat lokal. Dalam hal ini, tertib sosial politik yang berlaku tetaplah tertib sosial politik lama (Orde Baru), namun bekerja di bawah kendali pasar dibalik berbagai institusi demokratis yang baru.<sup>13</sup> Bertahannya kekuatan lama yang membentuk jejaring oligarki tidak dapat dilepaskan dari lemahnya berbagai institusi demokrasi yang ada paska Orde Baru serta demokrasi (yang masih sangat prosedural) itu sendiri.<sup>14</sup>

Penelitian ini memakai pendekatan teori mengenai oligarki dari Hadiz dan Robison karena dapat lebih membantu untuk menganalisis fenomena munculnya perempuan pemimpin politik di tingkat lokal dengan faktor kekerabatan

---

<sup>11</sup> Vedi R. Hadiz dan Richard Robison, "Ekonomi Politik Oligarki dan Pengorganisasian Kembali Kekuasaan di Indonesia," hlm.37.

<sup>12</sup> Michele Ford dan Thomas B. Pepinsky, "Beyond Oligarchy? Critical Exchanges on Political Power and Material Inequality in Indonesia," *Indonesia 96* (2013), hlm. 4, [versi elektronik], <http://www.jstor.org>, diakses pada Januari 2016..

<sup>13</sup> Vedi R. Hadiz dan Richard Robison, "Ekonomi Politik Oligarki dan Pengorganisasian Kembali Kekuasaan di Indonesia," hlm. 36.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 37-39.

yang merupakan bagian dari jejaring oligarki, sebagaimana diangkat dalam penelitian ini.

## ***Demokratisasi Lokal dan Kepentingan***

### ***Praktis Gender***

Para politisi dengan faktor kekerabatan kuat yang terus mampu mewariskan jaringan kekuasaannya pada generasi berikutnya, akan sampai pada kondisi dinasti politik. Akumulasi kekuasaan politik pada satu dinasti politik pada sebuah daerah dapat membahayakan demokratisasi lokal atau bahkan menghambatnya. Hal ini lantaran kemungkinan bahwa pola pemerintahan yang terbentuk dari sebuah dinasti politik cenderung memprioritaskan kepentingan penguatan dan penyebaran jaringan kuasanya dengan cara mengambil posisi-posisi kunci kelembagaan dan mengoptimalkannya secara terus-menerus, sehingga kerja lembaga-lembaga politik (misalnya legislatif dan eksekutif) menjadi tidak optimal dan pada taraf tertentu akan melumpuhkan inisiatif kritis warga masyarakat akibat dominasi dan represi nyata maupun terselubung dari dinasti politik yang berkuasa.

Mark R. Thompson (2012: 216) mencatat bahwa dinasti politik di Asia adalah sebuah “*modern hybrids*” yang dapat ditemukan baik di negara-negara berkembang di Asia maupun negara-negara maju seperti di Singapura dan Jepang, yang mana sebagian besar awalnya muncul pada fase gerakan nasionalisme atau ketika fase demokratisasi yang tidak menentu.<sup>15</sup> Pada konteks ini, maka keberadaan politisi yang kuat dengan faktor kekerabatan, berkelindan erat dengan munculnya dinasti politik di suatu daerah dan pada gilirannya akan berdampak erat pada demokratisasi dan tata kelola pemerintahan daerahnya.

Kekhawatiran tersebut juga muncul dalam konteks politik lokal di Indonesia khususnya dalam kasus kemunculan para perempuan

<sup>15</sup> Mark. R. Thompson, “Asia’s Hybrid Dynasties,” *Asian Affairs*, Vol. 43, No. 2 (2012): hal. 216, [versi elektronik], diakses via the Australian National University <http://dx.doi.org/10.1080/03068374.2012.682366>, diakses pada 17 Februari 2015. Lihat juga Claudia Derichs and Mark R. Thompson, *Dynasties and Female Political Leaders in Asia*, (Berlin: LIT, 2013).

pemimpin lokal dengan kekerabatan yang kuat. Hadiz (2010) menganalisis kondisi politik lokal dalam konteks UU No. 22/1999, bahwa desentralisasi di Indonesia pada dasarnya baru sampai pada tahap “*localizing power*” dimana bos-bos lokal (“*local strongmen*”) mendominasi dan mengendalikan politik lokal seperti halnya yang terjadi di Filipina dan Thailand. Hadiz sampai pada kesimpulan bahwa kebijakan desentralisasi di Indonesia secara tidak sengaja justru menghasilkan oligarki politik lokal yang ditunggangi oleh elit-elit lokal yang memburu kuasa.<sup>16</sup> Selain bersaing diantara para oligark, para oligark lokal ini juga bersaing dalam membajak (*hijacking*) partai-partai politik berkuasa (*the ruling party*), serta membajak agenda-agenda demokrasi di tingkat lokal yang mana hal tersebut dimungkinkan oleh besarnya sumber daya material yang mereka miliki sehingga dapat tetap menyesuaikan diri dengan iklim demokrasi di tingkat lokal.<sup>17</sup>

Jejaring oligarki di tingkat lokal dari para politisi perempuan yang maju dan terpilih dalam Pilkada langsung, telah lebih dahulu menguasai sumber daya material, sosial, serta kultural yang diakumulasikan untuk mempertahankan dan memperluas pengaruh dinasti politiknya. Para perempuan pemimpin politik lokal tersebut menjadi bagian penting dari sebuah oligarki lokal yang berkepentingan untuk mempertahankan hegemoni dan dominasinya. Pada konteks inilah, besar kemungkinan hal-hal yang mengarah pada demokratisasi lokal akan dikesampingkan oleh penguasa yang bersangkutan. Tidak menutup kemungkinan hal yang sama terjadi dalam kasus Airin Rachmi Diany Walikota Tangerang Selatan

<sup>16</sup> Vedi R. Hadiz, *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*, (Stanford, California: Stanford University Press, 2010). Lihat juga buku yang dipakai sebagai induk analisis Hadiz, yaitu John T. Sidel, “Bossism and Democracy in the Philippines, Thailand and Indonesia: Towards an Alternative Framework for the Study of Local Strongmen,” dalam John Harriss, Kristian Stokke, OlleTornquist (eds.), *Politicising Democracy: The New Local Politics of Democratisation*, (England: Palgrave, 2004), hlm. 51-74.

<sup>17</sup> Vedi R. Hadiz, *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*, hlm. 69-75.

(2011-2015 dan 2016-2021) yang merupakan istri dari Tubagus Chaeri Wardana, salah satu anak dari Chasan Shohib, maupun dalam kasus Anna Sophanah Bupati Indramayu (2010-2015 dan 2015-2020) yang merupakan istri dari Irianto M.S. Syafiuddin, Bupati Indramayu dua periode berturut-turut sebelumnya (2000-2005 dan 2005-2010).

Untuk menilai demokratisasi lokal pada kedua daerah tersebut di bawah kepemimpinan perempuan kepala daerah dengan faktor kekerabatan yang kuat, penelitian ini mengacu pada paper O'Donnell<sup>18</sup> dalam menyusun indikator-indikator yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

- Indikator umum mengenai demokrasi lokal terkait politik, yaitu inisiatif mengajukan Perda tentang kebebasan menyampaikan pendapat dan berorganisasi, transparansi informasi dan keterbukaan publik, serta adanya inisiatif atau program untuk membangun relasi politik yang efektif dan profesional antara lembaga eksekutif dan legislatif daerah
- Indikator umum mengenai demokrasi lokal terkait *Civil Society Organisation* (CSO), yaitu inisiatif untuk membuat program yang mendorong kemajuan/memfasilitasi CSO
- Indikator umum mengenai demokrasi lokal terkait akuntabilitas vertikal, yaitu adanya inisiatif untuk membuat mekanisme tanggung jawab dan tanggung gugat antara aparat negara dengan masyarakat, mendorong terciptanya keadilan hukum bagi semua masyarakat secara adil dan setara, serta inisiatif untuk mendorong semua kelompok masyarakat dapat

berpartisipasi secara adil dan setara (tidak ada diskriminasi)

- Indikator umum mengenai demokrasi lokal terkait ekonomi dan usaha, yaitu adanya inisiatif untuk mendorong para pelaku ekonomi dapat berkompetisi secara adil dan setara

Sementara itu, terkait kepentingan gender, penelitian ini menggunakan konsep dari Maxine Molyneux yang membagi kepentingan gender menjadi dua, yaitu kepentingan praktis gender dan kepentingan strategis gender. Menurut Maxine Molyneux (1985) kepentingan praktis gender (*practical gender interest*) meliputi serangkaian program yang berupaya memenuhi kebutuhan dan mengoptimalkan peran perempuan dalam konteks dan tujuan tertentu, sedangkan kepentingan strategis gender (*strategic gender interests*) berupaya mengatasi ketertinggalan perempuan di dalam masyarakat dengan menciptakan tatanan dan struktur yang lebih berkeadilan gender antara laki-laki dengan perempuan.<sup>19</sup> Dari dua kepentingan gender tersebut, penelitian ini fokus pada kepentingan praktis gender sebagai sesuatu yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan sehari-hari perempuan. Atas dasar konsep tersebut, indikator yang dipakai untuk menilai kinerja perempuan kepala daerah dalam mengupayakan pemenuhan kepentingan praktis gender, yaitu adanya inisiatif untuk mendorong Perda atau kebijakan yang pro kepentingan perempuan dan anak, serta inisiatif mendorong Perda atau kebijakan yang pro pada kesejahteraan rakyat (kesehatan, pendidikan, dll)

## Metode Penelitian

Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi metode studi kasus. Sebagaimana dikemukakan Robert K. Yin (1994) studi kasus berguna untuk menginvestigasi

---

<sup>18</sup> Baca Guillermo A. O'Donnell, "Why the Rule of Law," *Journal of Democracy*, Vol. 15, No. 4 (2004), hlm.37, [versi online], <http://muse.jhu.edu/journals/jod/summary/v015/15.4odonnell.html>, diakses pada 14 Oktober 2013; Guillermo O'Donnell, "Human Development, Human Rights, and Democracy," dalam Guillermo O'Donnell, Jorge Vargas Cullell, Osvaldo M. Iazzetta (eds.), *The Quality of Democracy Theory and Applications*, (USA: University of Notre Dame Press, 2004), hal 37-39; serta David F.J. Campbell, "The Basic Concept for the Democracy Ranking of the Quality of Democracy," *Research Fellow*, University of Klagenfurt, 2008, hlm. 28 dan 35.

---

<sup>19</sup> Maxine Molyneux, "Mobilization Without Emancipation? Women's Interests, the State, and Revolution in Nicaragua," *Feminist Studies*, Vol. 11, No. 2 (1985), hlm. 232-233; Caroline Moser, "Gender Planning in the Third World: Meeting Practical and Strategic Needs," dalam Rebecca Grant and Kathleen Newland (eds.), *Gender and International Relations*, (Suffolk: Open University Press, 1991), hlm. 89-90.

fenomena kontemporer di dalam konteks nyata.<sup>20</sup> Kasus yang diangkat adalah: (i) Airin Rachmi Diany, Walikota Tangerang Selatan (2011-2015 dan 2016-2021) dan (ii) Anna Sophanah, Bupati Indramayu (2010-2015 dan 2015-2020). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) yang dipandu oleh sebuah pedoman wawancara terstruktur, terhadap tim pemenangan dan beberapa responden.

Selain dengan wawancara mendalam, khususnya terkait kinerja perempuan kepala daerah dengan faktor kekerabatan yang kuat, juga dilihat dari temuan pada saat pengamatan di lapangan, serta dari penilaian sejumlah responden pada kuesioner yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Responden adalah warga di kedua daerah yang ditemui secara langsung pada saat penelitian dilakukan,<sup>21</sup> yang dipilih dengan metode *purposive sampling*, yang memfokuskan pada karakteristik atau unit sampling tertentu yang dianggap oleh peneliti dapat menjawab pertanyaan penelitian. Tidak ada ketentuan baku mengenai berapa banyak sampel dan cara menentukan sampel pada metode sampling ini, melainkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan peneliti sampai informasi yang diperoleh dirasa cukup. Biasanya, sampel yang digunakan dengan metode ini relatif sedikit. Tujuan dari metode *purposive sampling* tidak untuk membuat generalisasi, tetapi untuk memfokuskan pada karakteristik tertentu yang paling memungkinkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode sampling ini sering digunakan pada penelitian kualitatif. *Purposive sampling* memiliki beberapa tipe, salah satunya yaitu *maximum variation sampling* atau yang disebut juga sebagai *heterogeneous sampling*. Tipe ini digunakan untuk menangkap dengan lebih luas berbagai perspektif mengenai suatu hal yang akan diteliti.<sup>22</sup> *Purposive sampling*

<sup>20</sup> Robert K. Yin, *Case Study Research: Design and Methods*, (Thousand Oaks, London, New Dehli: Sage Publications, 1994), hlm. 13.

<sup>21</sup> Penelitian dilakukan di Tangerang Selatan pada 9-16 Mei 2016 dan di Indramayu pada 21-28 April 2016.

<sup>22</sup> "Purposive Sampling", <http://dissertation.laerd.com/purposive-sampling.php#>, diakses pada 11 Februari 2016.

ini sangat cocok untuk studi kasus dimana banyak aspek dari kasus tunggal yang representatif diamati dan dianalisis.<sup>23</sup>

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan peneliti, serta indikator-indikator yang digunakan, maka tim selaku peneliti menentukan langsung siapa saja yang menjadi responden. Untuk di Tangerang Selatan, responden yang digunakan sebanyak 29 orang yang terdiri dari 4 orang SKPD, 3 orang anggota DPRD, 3 orang komisioner KPUD, 6 orang masyarakat biasa, 8 orang anggota CSO, serta 5 orang pelaku usaha. Sedangkan di Indramayu, responden yang digunakan sebanyak 21 orang yang terdiri dari 5 orang SKPD, 3 orang anggota DPRD, 1 orang komisioner KPUD, 3 orang pelaku usaha, 2 orang ibu rumah tangga, serta 7 orang anggota Organisasi Masyarakat/LSM/Akademisi.

### **Kondisi Sosial-Politik, Ekonomi dan Historis Yang Memfasilitasi Kemunculan Perempuan Kepala Daerah dengan Kekerabatan yang Kuat**

#### ***Airin Rachmi Diany: Tangerang Selatan***

Kemunculan dan kemenangan Airin sebagai perempuan kepala daerah pertama di Tangsel tahun 2010, dan kemudian pada kemenangan kedua pada tahun 2015, perlu diletakkan dalam kerangka besar jejaring oligarki Chasan Sohib sebagai sang oligark terkuat di Banten. Meskipun dalam sejarah pembentukan Provinsi Banten banyak tokoh masyarakat yang berperan dan berpengaruh, tetapi dalam perkembangannya, Chasan kemudian melesat menjadi tokoh yang sangat berpengaruh. Sebagai seorang *jawara*, Chasan sangat ditakuti karena mengandalkan pendekatan kekerasan untuk menundukkan orang-orang yang berlawanan dengannya termasuk misalnya melakukan kekerasan terhadap para jurnalis,<sup>24</sup> terhadap para pedagang di pasar untuk mengamankan berbagai sumber

<sup>23</sup> Sudjana, *Metode Statistika*, (Bandung: Tarsito, 2002), hlm. 168.

<sup>24</sup> Keterangan AH, akademisi di Serang, dalam diskusi terfokus Tim Gender dan Politik Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, di Jakarta pada 8 Agustus 2016.

daya ekonominya.<sup>25</sup> Selain itu, Chasan bahkan telah memulai eksistensinya jauh sejak jaman Orde Baru, yaitu melalui perusahaan yang didirikannya, yang mensuplai kebutuhan logistik tentara di Divisi Siliwangi pada tahun 1967. Ia pun sering memenangkan kontrak pembangunan jalan dan pasar di Banten.<sup>26</sup> Pada masa Orde Baru pula, Chasan sebagai seorang *jawara* bersama-sama dengan ulama, merupakan pemimpin informal yang berafiliasi dengan Golkar, partai kuat kala itu. Hal ini menjadi salah satu modal sosial politik yang sangat penting untuk membangun dinasti politik di Banten.<sup>27</sup> Kesemua hal tersebut, akhirnya menjadikan Chasan sebagai tokoh paling kuat yang mendominasi Banten.

Jika pada masa Orde Baru sampai dengan tahun 2005, jejaring oligarki Chasan lebih banyak menggunakan pendekatan kekerasan dan intimidasi untuk mengukuhkan pengaruhnya, maka sejak Era Reformasi, terutama sejak Pilkada langsung diperkenalkan pada tahun 2005, jejaring oligarki keluarga Chasan Sohib mengubah strategi dan posisi, yaitu lebih pada pendekatan non-kekerasan dan mengincar jabatan-jabatan politik formal dengan tetap memanfaatkan basis kultural kharismatik tradisional *jawara*, dengan pengorganisasian yang lebih terlembaga. Chasan menggunakan jejaring *jawara* untuk membangun jejaring oligarki di seluruh daerah di provinsi Banten. Seperti misalnya, ia membentuk organisasi Relawan Banten Bersatu (RBB) yang diketuai oleh putranya sendiri, yaitu Tubagus Chaeri Wardana (Wawan), sebagai upaya untuk mengorganisir *jawara* guna mengawal pencalonan Ratu Atut Chosiyah (anak pertama

Chasan) & Masduki dalam Pilkada langsung Banten tahun 2007.

Chasan terus memperkuat jaringannya dengan berusaha menempatkan anggota keluarganya pada berbagai jabatan politik formal di wilayah Banten, termasuk diantaranya di Kabupaten Tangerang. Pada Pilkada langsung Kabupaten Tangerang tahun 2008, Chasan mendesak menantunya, Airin Rachmi Diany, untuk maju menjadi kandidat wakil bupati Kabupaten Tangerang. Airin merupakan ‘paket lengkap’ yang potensial dan menguntungkan bagi keluarga Chasan. Airin memiliki modal individu yang sangat kuat, tidak hanya dari segi pendidikan (lulusan S2 Hukum) dan pengalaman sosial yang memadai dalam berinteraksi dengan publik (pernah menjadi Puteri Indonesia Favorit tahun 1996), tetapi juga memiliki tampilan fisik yang menarik (dalam perspektif rata-rata laki-laki). Kendati demikian, semua itu nyatanya tidak cukup membuatnya dikenal masyarakat, serta tidak juga menjamin dirinya dapat masuk dan diperhitungkan dalam politik lokal di Banten, jika dirinya tidak menikah dengan Wawan dan menjadi bagian dari keluarga Chasan. Meskipun Airin kalah pada Pilkada langsung Kabupaten Tangerang tahun 2008, namun hal tersebut menjadi sarana baginya untuk memperkenalkan diri secara luas kepada publik sembari mengumpulkan pengalaman dan mengasah ketrampilan politik.

Kemudian, pada Pilkada langsung Kota Tangerang Selatan tahun 2010, Chasan melihat peluang yang sangat bagus untuk bisa menempatkan “orangnya” di daerah yang baru berdiri ini. Sebagai daerah baru, terlebih karena lokasinya yang strategis, Tangerang Selatan sangat terbuka untuk dieksplorasi dan menjadi target investasi properti sebagai penyangga utama Jakarta. Hal ini sangat disadari oleh para pengusaha, termasuk oleh keluarga Chasan Sohib. Terlebih lagi, dari hasil Pemilu Legislatif 2009, Golkar sebagai partai yang telah sejak lama berafiliasi dengan jejaring keluarga Chasan Sohib, di DPRD Tangerang Selatan menjadi kekuatan politik ketiga.<sup>28</sup> Hal ini menjadi salah

---

<sup>25</sup> Lihat Abdul Hamid, “A Family Matter: Political Corruption in Banten, Indonesia,” *Asian Politics and Policy* 6, no. 4 (2014).

<sup>26</sup> Okamoto Masaaki and Abdul Hamid, “Jawara in Power, 1999-2007”, *Indonesia* 86,(2008), hlm. 117-118.

<sup>27</sup> Lihat: Kurniawati Hastuti Dewi, “Kepemimpinan Kyai dan Jawara di Banten: Pengaruhnya Terhadap *Good Governance*”, dalam Iwan Kusuma and Agus Salim (eds.), *Stakeholders dan Kebijakan Publik dalam Dinamika Politik dan Pembangunan Daerah Provinsi Banten*, (Banten: Lembaga Strategis Pembangunan Banten, 2003).

---

<sup>28</sup> Jariungu, “Daftar Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Periode 2009-2014,” [http://jariungu.com/parlemen\\_profil.php?pageNum\\_rsAnggotaParlemen1=0&totalRows\\_rsAnggotaParl](http://jariungu.com/parlemen_profil.php?pageNum_rsAnggotaParlemen1=0&totalRows_rsAnggotaParl)

satu mesin politik penting dalam *bargaining power* terhadap kekuatan parpol lainnya guna memuluskan langkah Chasan menempatkan orangnya di Tangerang Selatan. Oleh karena itu, Chasan sebagai sang oligark, kembali mendukung Airin, serta mempersiapkan Airin sebagai calon walikota Tangerang Selatan, hingga berhasil mengantarkannya pada kemenangan.

Dengan demikian, dapat terlihat dengan jelas bagaimana kentalnya faktor kekerabatan yang disebabkan oleh hubungan perkawinan antara Airin dengan Wawan yang menjadi pintu bagi Airin untuk masuk ke dalam dinasti keluarga Chasan, sampai akhirnya berkecimpung dalam politik. Chasan berperan sentral mempersiapkan Airin sedemikian rupa untuk masuk politik praktis melalui Pilkada langsung Kabupaten Tangerang 2008 dan Pilkada langsung Kota Tangerang Selatan 2010. Sementara Wawan, suami Airin yang merupakan seorang pengusaha sekaligus ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Banten, menjadi penopang dalam menyediakan sumber daya finansial yang penting pada kemunculan dan kemenangan Airin pada Pilkada Tangerang Selatan tahun 2010, yang tidak dimiliki oleh kandidat lainnya.<sup>29</sup> Sebagaimana yang dikatakan dalam analisis Abdul Hamid (2014: 579) bahwa politik lokal di Banten (yang mana Tangerang Selatan termasuk salah satu daerah di wilayah Banten), dimulai sejak berdirinya provinsi ini tahun 2000, diwarnai dengan menguatnya "*familial ties*" (hubungan kekerabatan yang kuat) yang menyediakan struktur hirarki dan kepercayaan tinggi, yang memungkinkan untuk mengkoordinasikan keputusan terkait suksesi dan perpindahan sumber daya ekonomi dan politik antar generasi. Dalam mempertahankan kekuasaan politiknya, model politik "*familial ties*" ini bergantung pada kemampuan jaringan kekerabatan untuk melakukan mobilisasi dukungan, baik itu dari

---

emen1=48&idJenisParlemen=5&idParlemen=514&idKabKota=488&cariAnggotaParlemenDaerah=y%27&maxRows\_rsAnggotaParlemen1=48%27, diakses pada 15 September 2017.

<sup>29</sup> Keterangan NM, aktifis NGO, dalam diskusi terfokus Tim Gender dan Politik Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, di Tangerang Selatan pada 11 Mei 2016.

keluarga inti maupun keluarga jauh atas dasar pertalian daerah, perkawinan, maupun pertalian adat.<sup>30</sup>

Bermodalkan nama yang sudah semakin dikenal masyarakat dan berbagai pengalaman yang diperolehnya saat menjadi walikota di periode pertama, Airin kembali maju sebagai calon walikota Tangerang Selatan pada Pilkada langsung 2015 dan untuk kedua kalinya berhasil menang menjadi walikota terpilih. Sumber perolehan suara Airin banyak didapat dari wilayah yang merupakan kantong-kantong penduduk kurang mampu, seperti di Kecamatan Pamulang, Kecamatan Pondok Aren, dan Kecamatan Ciputat.<sup>31</sup> Ketiga kecamatan tersebut adalah daerah dengan jumlah penduduk miskin paling banyak.<sup>32</sup> Sementara di kecamatan Serpong Utara yang merupakan daerah perumahan kelas atas, memberikan kontribusi perolehan suara yang tidak besar bagi kemenangan Airin.<sup>33</sup> Pola ini menunjukkan bahwa penduduk strata bawah cenderung lebih mudah didekati oleh Airin, serta dimobilisasi untuk memperoleh simpati dan dukungan dibandingkan penduduk strata menengah atas yang cenderung abai terhadap program-program pemerintah daerah, maupun terhadap pelaksanaan Pilkada langsung. Rendahnya tingkat partisipasi pemilih lebih banyak dijumpai di daerah-daerah perumahan yang kebanyakan dihuni oleh penduduk strata menengah atas, sedangkan tingkat partisipasi yang tinggi lebih banyak dijumpai pada daerah

---

<sup>30</sup> Abdul Hamid, "A Family Matter: Political Corruption in Banten, Indonesia," hlm. 579.

<sup>31</sup> Pilkada2015, "Hasil Hitung TPS Kota Tangerang Selatan,'Rekapitulasi Data Sub Wilayah'," <http://pilkada2015.kpu.go.id/tangselkota>, diakses pada 13 September 2017.

<sup>32</sup> Bappeda Kota Tangerang Selatan, "Informasi Status Kesejahteraan Rumah Tangga dan Individu di Kota Tangerang Selatan," Basis data terpadu untuk program perlindungan sosial Maret 2012, tanpa hlm.

<sup>33</sup> Pilkada2015, "Hasil Hitung TPS Kota Tangerang Selatan,'Rekapitulasi Data Sub Wilayah'," <http://pilkada2015.kpu.go.id/tangselkota>, diakses pada 13 September 2017.



perkampungannya yang kebanyakan dihuni oleh penduduk strata bawah.<sup>34</sup>

### ***Anna Sophanah: Indramayu***

Kemunculan Anna Sophanah sebagai Bupati Indramayu dipengaruhi kuat oleh fenomena menguatnya jejaring oligarki politik di tingkat daerah, dalam hal ini yang terjadi di Kabupaten Indramayu. Kuatnya kuasa politik suaminya, Irianto MS Syaifudin (selanjutnya disebut Yance), menjadi faktor yang mempengaruhi kemunculan dan kemenangan Anna dalam dua periode Pilkada langsung di Kabupaten Indramayu, yaitu pada tahun 2010 dan 2015.<sup>35</sup> Yance merupakan tokoh politik perpanjangan Orde Baru yang kuat di Indramayu dan menjabat sebagai bupati selama dua periode berturut-turut sebelum Anna. Ia juga adalah ketua ormas Pemuda Pancasila (PP) Indramayu<sup>36</sup>, ketua Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia (Gapensi) di Indramayu, dan ketua DPD Golkar tahun 2009-2016. Selama kepemimpinannya di Indramayu, Yance dikenal tidak segan menggunakan kekerasan terhadap siapapun yang berposisi terhadapnya. demokratisasi tidak dirasakan publik Indramayu selama Yance berkuasa. Semua sektor (birokrasi, ekonomi, serta penguasaan semua *project*) dikuasai oleh Yance dan kerabatnya.<sup>37</sup>

Selama Yance menjabat bupati Indramayu, selaku istri Yance, secara otomatis Anna kemudian

<sup>34</sup> Wawancara Kurniawati Hastuti Dewi dan Atika Nur Kusumaningtyas dengan MS dan B, penyelenggara Pilkada Tangerang Selatan, di kantor KPUD Tangerang Selatan pada 11 Mei 2016.

<sup>35</sup> Wawancara Fathimah Fildzah Izzati dan Esty Ekawati dengan K, aktifis di Indramayu, pada 25 April 2016; serta wawancara Fathimah Fildzah Izzati dengan R, politisi DPRD Kabupaten Indramayu, pada 22 April 2016.

<sup>36</sup> Seperti diketahui, Pemuda Pancasila merupakan organisasi paramiliter yang memusatkan aktivitasnya dalam menjaga kepentingan bisnis kelas dominan yang berkuasa. Kini posisi ketua tersebut telah digantikan oleh anaknya yang bernama Daniel Muttaqin. Wawancara Fathimah Fildzah Izzati dan Esty Ekawati dengan O, aktifis di Indramayu, pada 27 April 2016.

<sup>37</sup> Keterangan OS, politisi DPR RI, dalam diskusi terfokus Tim Gender dan Politik Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, di Jakarta pada 6 Oktober 2016.

menjadi Ketua PKK.<sup>38</sup> Karir politik Anna praktis dimulai ketika ia menjadi anggota DPRD Kabupaten Indramayu periode 2009-2014. Adapun dalam keterlibatannya di berbagai organisasi seperti GOW, kemudian Muslimat NU<sup>39</sup>, dan sebagainya,<sup>40</sup> Anna tidak begitu menunjukkan performa yang membuatnya dapat dilihat sebagai figur kepala daerah di luar dari figur suaminya. Untuk memperlancar upayanya mencalonkan istrinya, Anna, sebagai bupati Indramayu penerusnya, Yance mengangkat latar belakang Anna yang berasal dari desa yang cenderung agamis untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang dimiliki Anna.<sup>41</sup> Yance mampu membalikkan tradisi kampanye politik di wilayah Islam yang secara umum bicara mengenai pelarangan perempuan menjadi pemimpin dengan mengkampanyekan istrinya menjadi

<sup>38</sup> Lihat Ani W. Soetjipto dan Shelly Adelina, *Suara dari Desa: Menuju Revitalisasi PKK*, (Tangerang: Marjin Kiri, 2013), hlm. 9. Hingga saat ini kepemimpinan PKK masih didasarkan pada posisi jabatan publik suami.

<sup>39</sup> Keterangan TH, politisi DPRD Indramayu, dalam diskusi terfokus Tim Gender dan Politik Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, di Indramayu pada 25 April 2016.

<sup>40</sup> Anna Sophanah lahir pada tanggal 23 Oktober 1958. Selama suaminya, Yance, menjadi bupati Indramayu, Anna aktif menjadi Ketua Penggerak PKK Kabupaten Indramayu. Anna juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Indramayu tahun 2000-2010. Penasehat Gerakan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Indramayu tahun 2000-2010, Ketua DPD KPPG (Golkar) Kabupaten Indramayu tahun 2004-2009, dan Ketua DPD Pengajian Al Hidayah Kabupaten Indramayu tahun 2004-2009. Informasi diperoleh dari keterangan RF, pegawai Pemerintah Kabupaten Indramayu, dalam diskusi terfokus Tim Gender dan Politik Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, di Indramayu pada 25 April 2016; serta lihat Dwi Ayu, "Ini Profil dan Kiprah Hj Anna Sophanah untuk Indramayu," 20 Oktober 2015, <http://indramayu.cirebontrust.com/ini-profil-dan-kiprah-hj-anna-sophanah-untuk-indramayu.html>, diakses pada 14 Mei 2016.

<sup>41</sup> Keterangan OS, politisi DPR RI, dalam diskusi terfokus Tim Gender dan Politik Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, di Jakarta pada 6 Oktober 2016.

pemimpin daerah.<sup>42</sup> Dalam sebuah wawancara yang disiarkan secara nasional oleh sebuah stasiun televisi swasta<sup>43</sup>, Anna secara terbuka mengungkapkan bahwa pencalonan dirinya sebagai Bupati memang didasarkan pada kiprah politik suaminya, dan bukan pada keputusan dirinya sendiri sebagai perempuan dengan gagasan yang hendak dibawa. Hal itu memperlihatkan dengan jelas bahwa majunya Anna dalam Pilkada langsung berkaitan dengan skema perluasan jejaring oligarki yang dibangun Yance disana.

Berdasarkan hasil Pemilu Legislatif 2009, Golkar menjadi kekuatan politik terbesar di Indramayu, sebanyak 24 orang anggota DPRD Indramayu berasal dari Partai Golkar.<sup>44</sup> Hal ini tentu saja menjadi kondisi politik lokal yang semakin memuluskan langkah sang oligark, Yance, untuk memenangkan istrinya, Anna, pada Pilkada langsung pertama yang diikuti Anna, yaitu tahun 2010. Kemenangan Anna untuk kedua kalinya dalam Pilkada langsung 2015 di Kabupaten Indramayu bukanlah suatu hal yang mengejutkan. Sejalan dengan konsep oligarki yang dikemukakan oleh Hadiz dan Robison, kemenangan Anna merupakan kemenangan jejaring oligarki yang telah terbangun di tingkat lokal, dalam hal ini oleh suaminya, Yance, yang telah membangun kuasa politik di Indramayu dengan menggunakan otoritas politik yang dimilikinya. Sebagaimana temuan dalam penelitian ini, para informan menyatakan bahwa Yance menjalankan otoritas politiknya<sup>45</sup> di

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Lihat rekaman wawancara wawancara Anna Sophanah dan Irianto.M.S.Syaifudin dengan Najwa Shihab dalam video berjudul “Kuasa Gono Gini Mata Najwa,” 23 November 2016, <https://www.youtube.com/watch?v=HMM7uopd4iY>, diakses pada 26 Oktober 2017.

<sup>44</sup> Jariungu, “Daftar Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Periode 2009-2014,” [http://www.jariungu.com/parlemen\\_profil.php?pageNum\\_rsAnggotaParlemen1=0&totalRows\\_rsAnggotaParlemen1=50&idJenisParlemen=4&idParlemen=149&idKabKota=116&cariAnggotaParlemenDaerah=y&maxRows\\_rsAnggotaParlemen1=50](http://www.jariungu.com/parlemen_profil.php?pageNum_rsAnggotaParlemen1=0&totalRows_rsAnggotaParlemen1=50&idJenisParlemen=4&idParlemen=149&idKabKota=116&cariAnggotaParlemenDaerah=y&maxRows_rsAnggotaParlemen1=50), diakses pada 15 September 2017.

<sup>45</sup> Baik sebagai mantan bupati dua periode, Ketua DPD

Indramayu dengan maksimal, tidak terkecuali dengan melakukan tindakan represif terhadap siapa saja yang menentanginya.

Bentuk-bentuk tindakan represif yang dilakukan Yance terhadap para penentanginya pun dilakukan dengan beragam cara, mulai dari intimidasi, pengancaman serta pembubaran diskusi.<sup>46</sup> Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indramayu pun tidak luput dari tindakan represif ini. Mereka diancam bahwa jika tidak loyal maka akan dimutasi ke tempat yang jauh.<sup>47</sup> Tindakan represif tersebut kemudian berimplikasi pada tidak adanya kekuatan politik alternatif yang muncul di luar kekuasaan jejaring Yance. Indramayu seolah menjadi daerah yang masih menggunakan pola-pola Golkar di masa Orde Baru.<sup>48</sup> Yance berusaha mengkondisikan agar segala sesuatu di Indramayu tergantung pada dirinya, termasuk diantaranya terkait parpol disana. Sehingga, tidak ada oposisi murni di Indramayu. Kalaupun ada, hubungannya proyek dan cuma bersifat sementara.<sup>49</sup>

Wilayah kemenangan Anna pada Pilkada langsung 2015 terdapat di 25 kecamatan dari 31 kecamatan yang ada di Indramayu. Adanya selisih suara yang cukup besar terutama terjadi di kecamatan Bongas (13.093), Gantar (9.356), Haurgeulis (10.860) dan Juntinyuat (9.808)<sup>50</sup>

---

Golkar, maupun Ketua Ormas Pemuda Pancasila, serta Dewan Penasehat dari Bupati Anna Sophanah.

<sup>46</sup> Wawancara Fathimah Fildzah Izzati dengan salah satu narasumber di Indramayu yang tidak ingin disebutkan identitasnya.

<sup>47</sup> Wawancara Fathimah Fildzah Izzati dan Esty Ekawati dengan O, aktifis di Indramayu, pada 27 April 2016.

<sup>48</sup> Keterangan OS, politisi DPR RI, dalam diskusi terfokus Tim Gender dan Politik Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, di Jakarta pada 6 Oktober 2016.

<sup>49</sup> Wawancara Fathimah Fildzah Izzati dan Esty Ekawati dengan salah satu narasumber yang tidak ingin disebutkan identitasnya, di Indramayu pada 27 April 2016.

<sup>50</sup> Data diolah dari “Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Indramayu Model DB-KWK, DB1-KWK, DB2-KWK, dan Model DB5-KWK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu tahun 2015”, data diperoleh langsung dari

menunjukkan kuatnya jejaring birokrasi, yang mana wilayah-wilayah tersebut dikenal sebagai wilayah “aman” bagi pasangan Anna-Supendi. Kedua puluh lima kecamatan tersebut merupakan wilayah pedesaan dengan sosiologis masyarakatnya cenderung berpendidikan dan bertaraf ekonomi rendah, serta kerap merasa takut terhadap ancaman-ancaman birokrasi, seperti misalnya tidak akan diperbaikinya jalan, kesulitan dalam mengurus KTP, serta kesulitan untuk memperoleh kartu pintar.<sup>51</sup> Sehingga, mereka memilih karena rasa takut dan mengikuti arahan tokoh-tokoh di daerahnya.<sup>52</sup> Sementara itu, di enam kecamatan lainnya, yaitu di kecamatan Cantigi, Indramayu, Jatibarang, Patrol, Sindang, dan Tukdana, suara dimenangkan oleh lawan dari pasangan Anna-Supendi, yakni Toto Sucartono-Rastawiguna yang diusung oleh PDIP.<sup>53</sup> Keenam kecamatan tersebut merupakan wilayah kota yang masyarakatnya lebih memiliki kecerdasan politik.

## **Kinerja Perempuan Kepala Daerah dalam Mendorong Demokratisasi Lokal dan Kepentingan Praktis Gender**

### ***Airin Rachmi Diany: Tangerang Selatan***

Kemunculan Airin yang kental diwarnai oleh adanya faktor kekerabatan yang kuat, sejak awal telah menimbulkan kekhawatiran dari sebagian aktivis dan CSO di Tangerang Selatan bahwa Airin hanya akan menjadi perpanjangan keluarga Chasan untuk mencari keuntungan-keuntungan pribadi, khususnya bagi bisnis jejaring keluarga

Chasan.<sup>54</sup> Sayangnya, kalangan yang memiliki kekhawatiran ini jumlahnya tidak cukup mampu menghadapi kekuatan keluarga Chasan.

Kekhawatiran tersebut kemudian terbukti. Setelah Airin menjadi walikota Tangerang Selatan, jejaring oligarki Chasan melalui suami Airin, Wawan, terus dibangun. Sepeninggalnya Chasan pada tahun 2011, Wawan kemudian memegang peran sentral yang mengkonsolidasi kekuasaan ekonomi dan politik di Banten. Wawan adalah aktor intelektual yang sangat berpengaruh yang memanfaatkan posisinya sebagai ketua Kadin Provinsi Banten menggantikan ayahnya, Chasan. Ia berperan sebagai “calo” proyek yang mengatur siapa mendapat apa, siapa mengerjakan apa, dan siapa menjadi apa di pemerintahan. Para jawara yang setia pada Chasan, tetap loyal kepada Wawan karena mendapatkan jatah tertentu dari proyek APBD dan APBN di Banten.<sup>55</sup> Tidak hanya itu, Wawan juga turut serta melakukan pengaturan proyek-proyek. Wawan membentuk koordinator lapangan yang membawahi kelompok orang yang ahli di bidang informasi dan teknologi berbasis *website*, pengaturan jabatan-jabatan birokrasi eselon II, III, dan IV di lingkungan pemerintah Provinsi Banten dan 4 pemerintah daerah yang telah diduduki oleh orang dari jejaring keluarga Chasan (Kabupaten Pandeglan, Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Tangerang Selatan).<sup>56</sup> Penempatan orang-orang kepercayaannya pada sejumlah dinas dilakukan untuk mengamankan proyek-proyek penting di bidang kesehatan, pendidikan, pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pengairan, konstruksi gedung-gedung pemerintahan,

---

KPUD Indramayu, pada 27 April 2016.

<sup>51</sup> Wawancara Fathimah Fildzah Izzati dan Esty Ekawati dengan K, aktifis di Indramayu, pada 25 April 2016.

<sup>52</sup> Keterangan OS, politisi DPR RI, dalam diskusi terfokus Tim Gender dan Politik Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, di Jakarta pada 6 Oktober 2016.

<sup>53</sup> Data diolah dari “Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Indramayu Model DB-KWK, DB1-KWK, DB2-KWK, dan Model DB5-KWK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu tahun 2015”, data diperoleh langsung dari KPUD Indramayu, pada 27 April 2016.

---

<sup>54</sup> Keterangan AI, aktifis NGO di Tangerang Selatan, dalam diskusi terfokus Tim Gender dan Politik Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, di Tangerang Selatan pada 11 Mei 2016.

<sup>55</sup> Pendapat GI, akademisi di Banten, sebagaimana dimuat dalam AyoGitaBisa, “Pasar Rau dan Kisah Dinasti Korupsi Banten,” 23 Desember 2013, <http://www.ayogitabisa.com/inspirasi/pasar-rau-dan-kisah-dinasti-korupsi-banten.html>, diakses pada 28 september 2016.

<sup>56</sup> Keterangan NM, aktifis NGO, dalam diskusi terfokus Tim Gender dan Politik Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, di Tangerang Selatan pada 11 Mei 2016.

pengadaan barang dan jasa elektronika, serta jasa konsultasi konstruksi.<sup>57</sup> Di Tangerang Selatan, Wawan bahkan selalu hadir dalam rapat-rapat resmi dan berperan mengarahkan pengerjaan program-program di empat dinas di Tangerang Selatan, yaitu dinas pendidikan, kesehatan, tata ruang, dan pekerjaan umum, pada sejumlah perusahaan miliknya atau keluarganya.<sup>58</sup>

Pada tahun 2013, Wawan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas sangkaan sejumlah kasus, diantaranya yaitu, kasus korupsi pembangunan RSUD Tangerang Selatan, dan korupsi pengadaan alat kesehatan di Tangerang Selatan. Menghadapi kasus tersebut, Airin berusaha menunjukkan sikap yang seolah memisahkan antara persoalan politik dengan persoalan bisnis keluarga Chasan, terutama dalam hal ini bisnis suaminya, Wawan. Namun pada praktiknya, Airin nampaknya sulit menjauhkan diri dari belenggu kepentingan jejaring keluarga Chasan. Ia sulit memisahkan posisinya secara personal sebagai istri Wawan, dan posisinya sebagai walikota Tangerang Selatan. Dalam rilis laporan Koalisi Masyarakat Sipil Kota Tangerang Selatan, 14 September 2015, dikemukakan fakta persidangan yang menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kota Tangerang Selatan, menunjukkan bahwa **Airin melakukan pembiaran terhadap persoalan** pengadaan alat kesehatan kedokteran umum Tangerang Selatan tahun anggaran 2012 yang telah menjerat Wawan.<sup>59</sup> Pada titik tertentu, seperti pada kasus penggunaan nama Airin dalam aset pribadi dan perusahaan milik Wawan, Airin pun mengakui bahwa hal itu memang terjadi.

Hal tersebut di atas menunjukkan sebuah gejala *rent-seeking politics*. Meskipun telah ada sejak lama, aktifitas *rent-seeking* masih saja terjadi di Indonesia dalam konteks desentralisasi baru, paska Soeharto, dengan patron-patron lokal yang relatif independen,

<sup>57</sup> *Ibid.*

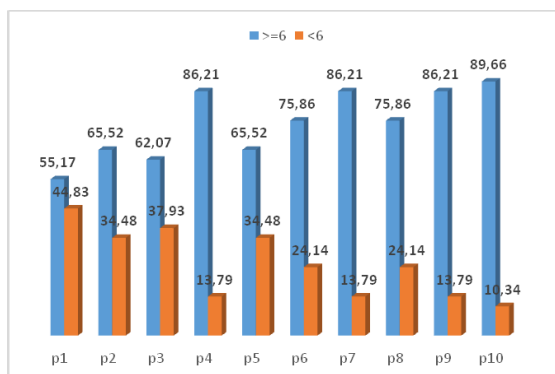
<sup>58</sup> Wawancara Kurniawati Hastuti Dewi dan Atika Nur Kusumaningtyas dengan Be, aktifis NGO di Tangerang Selatan, pada 13 Oktober 2016.

<sup>59</sup> Lihat Koalisi Masyarakat Sipil Kota Tangsel, “Koalisi Masyarakat Sipil Kota Tangerang Selatan Menuntut KPK untuk Mengusut Tuntas Kasus Korupsi di Kota Tangerang Selatan”, Rilis Aksi, 14 September 2015.

mampu melakukan metamorfosis, menunggangi kebijakan desentralisasi baru, dan merebut lembaga-lembaga desentralisasi.<sup>60</sup> Menurut Buehler (2010) aktifitas *rent-seeking* ini menjadi salah satu tantangan serius yang dihadapi para politisi dan kepala daerah untuk mewujudkan *good governance* dan kesejahteraan masyarakat.<sup>61</sup> Mengingat Airin berasal dari kekerabatan politik yang kuat, yaitu bagian jejaring oligarki dan politik dinasti Chasan, maka Airin dihadapkan pada posisi dan peluang yang lebih besar untuk melakukan *rent-seeking*. Hal ini lantaran suaminya, Wawan, merupakan pengusaha besar, serta tokoh sentral baru dalam jejaring oligarki Chasan yang memiliki kepentingan akumulasi kapital dan politik di Provinsi Banten. Konsekuensinya, Airin sebagai perempuan kepala daerah akan menghadapi lebih banyak lapisan kesulitan dalam upaya mendorong dan mewujudkan demokratisasi lokal, yang juga mencakup tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta menyejahterakan masyarakat, termasuk dalam hal pemenuhan kepentingan praktis gender.

<sup>60</sup> Richard Robison dan Vedi R Hadiz, *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in Age of Markets*, (London: Routledge Curzon, 2004), hlm. 69-253; serta Vedi R. Hadiz, “Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives,” *Development and Change* 35, no. 4 (2004): 697-718.

<sup>61</sup> Michael Buehler, “Indonesia: Countries at The Cross Roads”, <http://michaelbuehler.asia/wp-content/uploads/2012/06/BuehlerFH2010.pdf>, diakses pada 29 September 2016.



**Gambar 1.** Persentase Penilaian Responden Mengenai Demokratisasi Lokal dan Kepentingan Praktis Gender di Tangerang Selatan.<sup>62</sup>

Dari grafik tersebut terlihat bahwa secara keseluruhan, responden memberikan penilaian yang tinggi terhadap kinerja Airin terutama dalam mendorong demokratisasi lokal.<sup>63</sup> Meskipun demikian, jika dikaji lebih mendalam, keadaan sebenarnya di lapangan menunjukkan adanya kenyataan yang berbeda. *Pertama*, terkait kebebasan berpendapat dan berorganisasi (p1). Meskipun memang Airin sering mengadakan kegiatan *open office* untuk mengetahui berbagai pengaduan atau pendapat dari masyarakat, akan tetapi dalam kenyataannya kegiatan tersebut belum berjalan optimal. Tidak semua masyarakat mengetahui adanya kegiatan tersebut. Bahkan hingga saat ini, belum terdapat Perda mengenai kebebasan menyampaikan pendapat dan berorganisasi di Tangerang Selatan. *Kedua*, terkait dengan kebijakan pemerintah daerah dalam memfasilitasi keberadaan CSO (p4). Kendati saat ini di Tangerang Selatan belum ada Perda

<sup>62</sup> Indikator-indikator untuk menilai demokratisasi lokal, yaitu dari p1-p8. p1 = bebas berpendapat, p2 = transparansi informasi, p3 = relasi politik yang efektif dan profesional, p4 = dorongan pada CSO, p5 = mekanisme tanggung jawab dan tanggung gugat, p6 = keadilan hukum, p7 = tidak adanya diskriminasi, serta p8 = kompetisi adil antara pelaku ekonomi. Sementara indikator-indikator untuk menilai kepentingan praktis gender, yaitu p9-p10. p9 = kebijakan pro kepentingan perempuan dan anak, serta p10 = kebijakan pro kesejahteraan rakyat.

<sup>63</sup> Penilaian terhadap demokratisasi lokal dapat dilihat pada Grafik 1 p1-p8. Dari skala nilai 1-10, responden lebih dominan memberikan nilai lebih dari atau sama dengan 6 untuk kedelapan indikator demokratisasi lokal.

mengenai CSO atau ormas, namun di Tangerang Selatan terdapat program untuk pemberdayaan LSM dan ormas.<sup>64</sup> Pada praktiknya, program pemberdayaan tersebut bukanlah berupa arahan atau pembinaan dari Airin agar ormas-ormas yang ada dapat saling bekerja sama untuk memberikan kontribusi riil pada pembangunan Tangerang Selatan. Pemberdayaan tersebut lebih berupa memberikan proyek atau dana hibah kepada ormas-ormas agar mereka tidak lagi melakukan aksi mengkritisi pemerintahan Airin.<sup>65</sup> Maka tidak mengherankan jika kemudian belum ada sinergi, baik itu antar CSO, maupun antar CSO dengan Pemkot Tangerang Selatan dalam diskusi untuk merumuskan kebijakan guna mencari solusi dari persoalan-persoalan lokal. *Ketiga*, terkait dorongan kompetisi secara adil pada para pelaku ekonomi (p8). Dalam kenyataan yang terjadi, terdapat perbedaan perlakuan antara yang diterima oleh pengembang besar dengan pengembang menengah atau kecil, serta terdapat permainan dalam hal perijinan oleh oknum SKPD.<sup>66</sup> Selain itu, dikuasanya sejumlah pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek di Tangerang Selatan oleh perusahaan milik Wawan menunjukkan terdapatnya kompetisi yang tidak adil pada pelaku ekonomi.

Ketimpangan antara persepsi melalui penilaian kuesioner dan realita tersebut dapat dipahami jika melihat komposisi penduduk Tangerang Selatan yang terbelah menjadi dua kelompok, yakni kelompok penduduk lokal yang cenderung berpendidikan rendah dan kurang kritis, serta kelompok penduduk pendatang yang cenderung berpendidikan tinggi namun apatis terhadap sekitar, termasuk terhadap birokrasi dan kebijakan pemerintah daerahnya. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya rasa memiliki dari penduduk Tangerang Selatan terhadap kotanya,

<sup>64</sup> Keterangan NM, aktifis NGO, dalam diskusi terfokus Tim Gender dan Politik Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, di Tangerang Selatan pada 11 Mei 2016.

<sup>65</sup> Wawancara Kurniawati Hastuti Dewi dan Atika Nur Kusumaningtyas dengan Be, aktifis NGO di Tangerang Selatan, pada 13 Oktober 2016.

<sup>66</sup> Wawancara Kurniawati Hastuti Dewi dengan R, pengembang perumahan di Tangerang Selatan, pada 16 Mei 2016.

khususnya dari kelompok pendatang. Selain itu, CSO dan birokrasi di Tangerang Selatan yang tidak berperan secara optimal sebagaimana seharusnya, serta cenderung berorientasi pada kepentingannya masing-masing, juga menjadi penjelas adanya ketimpangan tersebut.

Selain penilaian terhadap demokratisasi lokal, Grafik 1 juga memperlihatkan penilaian yang tinggi dari responden terhadap kinerja Airin terkait kepentingan praktis gender di Tangerang Selatan.<sup>67</sup> Terkait kepentingan praktis gender di Tangerang Selatan telah terangkum dalam salah satu misi Airin, yaitu pada misi pertama, meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat dimana salah satu sasarannya adalah terjaminnya keadilan gender dalam berbagai program pembangunan. Selama masa kepemimpinan Airin, memang terdapat dorongan untuk menghasilkan Perda yang pro terhadap kepentingan praktis gender, meskipun kemudian pada kenyataannya belum disertai dengan eksekusi yang baik.<sup>68</sup> Program-program yang ada untuk kepentingan perempuan dan anak (p9) bukanlah ide atau inisiatif awal dari Airin selaku perempuan kepala daerah ataupun dari para SKPD-nya, melainkan hanya meneruskan program dari pemerintah pusat.<sup>69</sup>

Sementara terkait kesejahteraan rakyat (p10), di bidang pendidikan, Pemkot Tangerang Selatan memberikan pendidikan gratis kepada pelajar sampai dengan tingkat SMP dan direncanakan akan dilanjutkan hingga SMA. Sementara pada bidang kesehatan, terdapat program berobat gratis bagi masyarakat cukup hanya dengan menunjukkan KTP Tangerang Selatan. Selain itu, juga terdapat program pemberian tambahan makanan dan vitamin pada balita berupa

---

<sup>67</sup> Penilaian terhadap kepentingan praktis gender dapat dilihat pada Grafik 1 p9-p10. Dari skala nilai 1-10, responden dominan memberikan nilai lebih dari atau sama dengan 6 untuk kedua indikator kepentingan praktis gender.

<sup>68</sup> Wawancara Kurniawati Hastuti Dewi dan Atika Nur Kusumaningtyas dengan Be, aktifis NGO di Tangerang Selatan, pada 13 Oktober 2016.

<sup>69</sup> Wawancara Kurniawati Hastuti Dewi dan Atika Nur Kusumaningtyas dengan A dan MA, birokrat Pemkot Tangerang Selatan, di kantor BPMPKB Tangerang Selatan pada 12 Mei 2016.

biskuit serta makanan pendamping air susu ibu (ASI) secara gratis pada setiap kegiatan rutin posyandu setiap bulannya. Sayangnya, program-program tersebut pada praktiknya tidak terimplementasikan dengan baik, seperti misalnya, kurangnya kualitas pelayanan terhadap pasien pengguna fasilitas program berobat gratis,<sup>70</sup> serta terdapatnya temuan dari hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait program pemberian makanan tambahan pada balita.<sup>71</sup>

Komitmen Airin selaku perempuan kepala daerah dalam mendorong dan memperjuangkan kepentingan praktis gender tidak terlihat dalam postur anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan perempuan dan anak. Anggaran untuk kepentingan ini hanya mendapat alokasi yang minim,<sup>72</sup> sedangkan permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan diselesaikan terkait perempuan dan anak begitu beragam. Selain itu, kuantitas program pembangunan yang dilakukan di berbagai bidang, sampai saat ini, belumlah disertai kualitas yang memadai. Dalam proses penyusunan APBD, Airin selaku perempuan kepala daerah yang diharapkan bisa memberikan perhatian lebih kepada permasalahan perempuan dan anak justru jarang menghadiri rapat penyusunan anggaran bersama DPRD. Ia justru lebih banyak diwakili oleh wakil walikota atau oleh para SKPD-nya.<sup>73</sup>

Sama halnya penilaian terkait demokratisasi lokal, penyebab terjadinya kesenjangan antara penilaian responden melalui kuesioner

---

<sup>70</sup> Wawancara Kurniawati Hastuti Dewi dan Atika Nur Kusumaningtyas dengan Be, aktifis NGO di Tangerang Selatan, pada 13 Oktober 2016.

<sup>71</sup> Data diperoleh dari TA, pegiat Pemilu, “Temuan ‘Kerugian Keuangan Daerah’ oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Sepanjang Tahun 2009, 2010, dan 2011 (Dibawah Kepemimpinan: Dadang, M.Epid.)”

<sup>72</sup> Berdasarkan data BAPPEDA Tangerang Selatan, “Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Tahun Anggaran 2013-2016 Pemkot Tangerang Selatan.”

<sup>73</sup> Wawancara Kurniawati Hastuti Dewi dan Atika Nur Kusumaningtyas dengan T, politisi di DPRD Tangerang Selatan, di kantor DPRD Tangerang Selatan pada 12 Mei 2016.

dengan fakta yang terjadi terkait kepentingan praktis gender adalah karena terbagi duanya penduduk Tangerang Selatan. Penduduk strata menengah atas yang tinggal di perumahan dengan kemampuan ekonomi yang telah mandiri sehingga tidak membutuhkan bantuan program-program sosial dari Pemkot Tangerang Selatan, telah membuat mereka cenderung tidak peduli dan tidak melihat adanya persoalan krusial terkait kepentingan praktis gender, termasuk kesejahteraan masyarakat Tangerang Selatan. Sementara penduduk strata bawah dengan kemampuan ekonomi rendah, meskipun terdapat berbagai kekurangan, namun mereka merasa terbantu dan cukup senang dengan adanya program-program bantuan dari Pemkot Tangerang Selatan. Meskipun Airin sudah menjabat selama satu periode sejak 2011 sampai dengan 2015 dan saat ini telah memasuki periode keduanya, tidak ada sebuah terobosan besar yang dilakukan untuk menjadikan Tangerang Selatan sebagai kota yang membanggakan atau memiliki keunggulan dalam satu bidang tertentu, padahal Tangerang Selatan memiliki potensi sangat besar dalam hal keuangan, aparat birokrasi yang kuat, serta mayoritas masyarakat yang terpelajar.<sup>74</sup>

Penelitian ini menggarisbawahi bahwa pekerjaan rumah terbesar Airin sebagai perempuan kepala daerah adalah untuk mampu muncul dengan karakter, independensi, serta prestasi yang benar-benar baru dan berbeda dari jejaring oligarki Chasan. Meskipun Airin sebenarnya memiliki modal individu dan sosial yang sangat memadai, namun kemunculan Airin masih belum dapat merepresentasikan kemunculan generasi baru keluarga Chasan yang berbeda dengan generasi-generasi pendahulunya. Sejauh ini, penelitian ini menyimpulkan bahwa kiprah Airin masih sebatas memperlihatkan 'narasi simbolik perempuan' (*symbolic narratives of women*) dan belum sampai pada 'narasi substantif perempuan' (*substantive narratives of women*).

<sup>74</sup> Keterangan AI dan AS, aktifis NGO di Tangerang Selatan, dalam diskusi terfokus Tim Gender dan Politik Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, di Tangerang Selatan pada 11 Mei 2016.

### ***Anna Sophanah: Indramayu***

Meskipun sama-sama ditopang oleh faktor kekerabatan yang kuat, namun tidak seperti Airin di Tangerang Selatan yang masih berusaha menampilkan dirinya yang seolah dapat memisahkan diri antara sikap politik dirinya dengan persoalan bisnis keluarga Chasan, di Indramayu, Anna justru memperlihatkan sikap yang sebaliknya. Dalam sebuah wawancara di salah satu TV nasional, Anna mengakui bahwa ia mengusung program yang sama dengan program yang diusung suaminya, Yance, ketika masih menjabat sebagai bupati Indramayu. Lebih lanjut, Anna pun mengatakan secara eksplisit bahwa dirinya tidak memiliki inovasi program dalam menjalankan pemerintahannya dan hanya murni melanjutkan program-program yang telah dijalankan oleh suaminya selama dua periode.<sup>75</sup> Padahal, permasalahan yang ada di Kabupaten Indramayu, khususnya permasalahan yang terkait dengan kehidupan perempuan di Indramayu cukup parah dan membutuhkan penanganan tepat. Idealnya, Anna sebagai perempuan kepala daerah semestinya mampu memprioritaskan permasalahan-permasalahan perempuan dalam kebijakan-kebijakannya dan berupaya memenuhi kepentingan praktis gender. Namun nyatanya, Anna bahkan belum merasa sepenuhnya sebagai bupati Indramayu.<sup>76</sup> Jika ada warganya yang datang hendak menyampaikan aspirasi, Anna pun tidak pernah menemuinya secara langsung.<sup>77</sup>

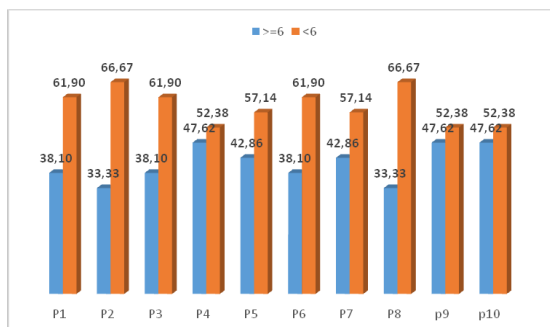
Dalam menjalankan pemerintahannya, posisi Anna sebagai bupati Indramayu pun berada di bawah kontrol penuh suaminya, Yance. Hal ini diakui secara terbuka oleh Yance bahwa ia bahkan memiliki ruangan khusus di kantor bupati atau yang lebih sering disebut dengan "pendopo" untuk mengontrol penuh kebijakan-kebijakan serta keputusan yang dibuat oleh

<sup>75</sup> "Kuasa Gono Gini Mata Najwa," 23 November 2016, <https://www.youtube.com/watch?v=HMM7uopd4iY>, diakses pada 26 Oktober 2017.

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> "Ormas Indramayu: Bupati Anna Tak Layak Memimpin Indramayu," <http://www.indramayupost.com/2012/02/ormas-indramayu-bupati-anna-tak-layak.html>, diakses pada 26 Oktober 2017.

istrinya, Anna.<sup>78</sup> Begitu kuatnya pengaruh Yance pada pemerintahan Anna, berdampak pada sulit terwujudnya demokratisasi lokal di Indramayu.



Sumber: dibuat oleh penulis.

**Gambar 2.** Persentase Penilaian Responden Mengenai Demokratisasi Lokal dan Kepentingan Praktis Gender di Indramayu.<sup>79</sup>

Berbeda dengan di Tangerang Selatan, secara keseluruhan, responden di Indramayu memberikan penilaian yang rendah terhadap kinerja Anna dalam mendorong demokratisasi lokal maupun kepentingan praktis gender.<sup>80</sup> Jika di Tangerang Selatan terdapat kesenjangan antara penilaian responden melalui kuesioner dengan kenyataan yang ditemui, tidak demikian halnya di Indramayu. Tidak terdapat kesenjangan antara penilaian responden di Indramayu melalui kuesioner dengan kondisi riil yang terjadi.

*Pertama*, terkait dorongan kepada para pelaku ekonomi untuk berkompetisi secara

<sup>78</sup> “Kuasa Gono Gini Mata Najwa,” 23 November 2016, <https://www.youtube.com/watch?v=HMM7uopd4iY>, diakses pada 26 Oktober 2017.

<sup>79</sup> Indikator-indikator untuk menilai demokratisasi lokal, yaitu dari p1-p8. p1 = bebas berpendapat, p2 = transparansi informasi, p3 = relasi politik yang efektif dan profesional, p4 = dorongan pada CSO, p5 = mekanisme tanggung jawab dan tanggung gugat, p6 = keadilan hukum, p7 = tidak adanya diskriminasi, serta p8 = kompetisi adil antara pelaku ekonomi. Sementara indikator-indikator untuk menilai kepentingan praktis gender, yaitu p9-p10. p9 = kebijakan pro kepentingan perempuan dan anak, serta p10 = kebijakan pro kesejahteraan rakyat.

<sup>80</sup> Lihat Grafik 2, dari skala 1-10, responden dominan memberikan nilai kurang dari 6 untuk semua indikator demokratisasi lokal (p1-p8) maupun indikator kepentingan praktis gender (p9-p10).

adil (p8). Jika melihat besarnya angka buruh migran dari Indramayu keluar negeri, salah satu penyebabnya adalah minimnya industri di Indramayu. Investor terhambat untuk masuk ke Indramayu dikarenakan sikap pemerintah daerah, termasuk bupati, yang cenderung tidak melakukan promosi daerah dan tidak adanya kemudahan perizinan.<sup>81</sup> Pemerintah daerah setempat seolah enggan membuka kran investasi di Indramayu. Minimnya industri di Indramayu berdampak pada terbatasnya lapangan kerja. Akibatnya, masyarakat lebih memilih menjadi buruh migran keluar negeri demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

*Kedua*, terkait kebebasan berpendapat (p1) di Indramayu yang cenderung represif dalam menanggapi kritik terhadap pemerintahan dinasti Yance. Kepemimpinan Yance yang tegas mampu mengubah wajah Indramayu yang terkenal dengan tawuran menjadi lebih damai. Namun, peredaman gejolak di masyarakat justru berimbas juga ke aspek partisipasi politik dan kebebasan berpendapat di Indramayu. Organisasi massa, akademisi, dan media massa yang kritis terhadap kebijakan pemerintah Yance maupun Anna mendapatkan tekanan dari pihak Yance maupun organisasi aliansinya, yakni Pemuda Pancasila. Akibatnya, tidak ada kontrol sosial di masyarakat terhadap kinerja bupati Indramayu. Padahal sikap kritis masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah penting bagi pelaksanaan demokrasi lokal. Pada masa menjelang Pilkada, mobilisasi massa bahkan dilakukan melalui *kuwu* (kepala desa) yang secara otoritatif masih cukup disegani oleh masyarakat.<sup>82</sup>

*Ketiga*, indikator terkait dorongan pada CSO (p4) mendapatkan penilaian yang terbilang cukup tinggi dibandingkan indikator demokratisasi lokal lainnya. Meskipun responden yang memberikan penilaian rendah (52,38%) lebih banyak dibandingkan yang memberikan penilaian tinggi (47,68%), namun untuk indikator ini, selisih keduanya tidak terpaut jauh. Penilaian ini seiring

<sup>81</sup> Wawancara Esty Ekawati dan Fathimah Fildzah Izzati dengan HG, pengusaha di Indramayu, pada 24 April 2016.

<sup>82</sup> Wawancara Fathimah Fildzah Izzati dan Esty Ekawati dengan BL dan O, aktifis di Indramayu, pada 27 April 2016.



dengan keberadaan Organisasi Masyarakat (Ormas) dan LSM di Indramayu yang cukup banyak. Berdasarkan data Bakesbanglinmas Kabupaten Indramayu, ada 19 Ormas dan 85 LSM yang terdaftar sampai tahun 2014. Dari jumlah tersebut, terdapat ormas/LSM yang mendukung dan mengkritisi pemerintah daerah. Salah satu ormas pendukung bupati adalah Pemuda Pancasila (PP) yang dipimpin oleh anak Yance-Anna, Daniel Muttaqien, meneruskan kepemimpinan yang sebelumnya dipegang oleh Yance. Adapun ormas/LSM yang kritis terhadap kepemimpinan Anna antara lain Serikat Buruh Migran Cabang Indramayu (SBMI), Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah (PKSPD), Ikatan Remaja Balongan (IRBA), dan Pos Bantuan Hukum Berbasis Masyarakat (PBHBM). Posisi lembaga tersebut mengkritisi kepemimpinan Anna yang dianggap hanya sebagai “boneka” suaminya. Selain itu, mereka juga mengkritisi berbagai persoalan seperti pendidikan, kesehatan, petani, dan buruh di Indramayu yang masih belum mampu diselesaikan oleh Anna. Dalam ranah demokratisasi lokal, kepemimpinan Anna dianggap gagal dalam pembangunan kesadaran demokratis di Indramayu.<sup>83</sup>

Sejalan dengan Edward Aspinall yang menggarisbawahi peran kelompok-kelompok kelas bawah dalam menggerakkan desakan yang kritis,<sup>84</sup> saat ini kelompok-kelompok marjinal (LSM) di Indramayu banyak yang digerakkan oleh penduduk strata bawah. Namun begitu, apa yang disuarakan oleh serikat-serikat dan LSM ini masih sebatas hanya pada tuntutan-tuntutan yang bersifat *basic rights* dan belum beranjak pada konsolidasi yang lebih riil dalam membentuk kekuatan politik tandingan/alternatif di luar jejaring oligarki Yance yang berkuasa disana. Dengan kata lain, mereka yang mengkritisi kinerja Anna dan bahkan sejak masa suaminya, Yance, memerintah pun, tidak selalu melihat akar

<sup>83</sup> Redaksi, “Ormas: Bupati Indramayu Tak Layak Lagi Memimpin,” 2 Februari 2012, <http://vps-1117292-13465.manage.myhosting.com/detail.php?id=90600>, diakses pada 2 Agustus 2016.

<sup>84</sup> Lihat versi aslinya Edward Aspinall, “Popular Agency and Interests in Indonesia’s Democratic Transition and Consolidation,” *Indonesia* 96 (2013): hlm. 102-103.

dari permasalahan yang terjadi di Kabupaten Indramayu.<sup>85</sup>

Meski sebagian CSO bersikap kritis terhadap pemerintah, namun masih ada CSO yang tidak hanya kritis tapi juga bersinergi dengan SKPD kabupaten Indramayu. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) adalah salah satunya yang proaktif dalam mengadvokasi perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta program kesehatan.<sup>86</sup> Sinergitas KPI dengan SKPD kabupaten Indramayu diharapkan mampu menemukan solusi atas problematik sosial di masyarakat terutama persoalan perempuan dan anak.

Sejauh ini, kinerja Anna terkait pemenuhan kepentingan praktis gender dinilai masih kurang. Grafik 2 memperlihatkan bahwa kendati tidak terlalu terpaut jauh, namun persentase responden yang memberikan penilaian rendah masih lebih besar dibandingkan yang memberikan penilaian tinggi.<sup>87</sup> Responden yang memberikan nilai rendah didasarkan pada kondisi bahwa meskipun sudah terdapat sejumlah Perda terkait perempuan dan anak, kesehatan dan pendidikan, serta terdapat sejumlah program terkait perempuan dan anak yang diadopsi dari misi pemerintah kabupaten Indramayu, akan tetapi implementasinya masih belum maksimal. Itupun, program yang ada bukanlah inisiatif Anna, tetapi lebih pada kinerja SKPD bersama para mitra. Belum maksimalnya implementasi program terkait perempuan dan anak ini dapat terkonfirmasi dari data BPS mengenai IPM Kabupaten Indramayu yang berada di urutan terendah se-Jawa Barat.<sup>88</sup> Selain itu, meski sudah ada regulasi mengenai perlindungan terhadap perempuan, namun dalam kenyataannya kasus *trafficking*,<sup>89</sup> peningkatan

<sup>85</sup> Wawancara Fathimah Fildzah Izzati dan Esty Ekawati dengan T, aktifis di Indramayu, pada 25 April 2016.

<sup>86</sup> Wawancara Esty Ekawati dan Fathimah Fildzah Izzati dengan TW, aktifis perempuan di Indramayu, pada 25 April 2016.

<sup>87</sup> Penilaian terhadap kepentingan praktis gender dapat dilihat pada Grafik. 2 indikator p9-p10..

<sup>88</sup> *Statistik Daerah Kabupaten Indramayu 2014*, (Indramayu: BPS Kabupaten Indramayu, 2014), hal.9.

<sup>89</sup> Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan

jumlah buruh migran perempuan,<sup>90</sup> prostitusi, tingginya angka pernikahan dini dan angka perceraian, tingginya angka kematian ibu (AKI)<sup>91</sup> dan angka kematian bayi (AKB),<sup>92</sup> serta kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi. Postur anggaran yang dialokasikan untuk penyelesaian persoalan perempuan dan anak masih minim. Bahkan, masyarakat di daerah Balongan yang berada disekitar PT PERTAMINA justru mendapatkan kemudahan/ bantuan kesehatan dan ekonomi bukan dari pemerintah daerah, melainkan dari perusahaan sebagai bagian dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT PERTAMINA.

Adapun responden yang memberikan penilaian tinggi dikarenakan masyarakat tidak bisa membedakan mana program pemerintah daerah dan yang mana program pemerintah pusat, sehingga responden mengatakan bahwa ada banyak program pemerintah daerah yang baik seperti BPJS, pendidikan gratis dan lainnya. Padahal jika dilihat lagi, program-program seperti BPJS, pendidikan gratis, P2WKSS, dan PKH (Program Keluarga Harapan) adalah program pemerintah pusat.

Kebhasilan menghadirkan perempuan sebagai bupati di Indramayu nyatanya tidak serta merta mampu menyelesaikan problem masyarakat Indramayu. Anna sebagai perempuan yang terpilih menjadi kepala daerah, berasal dari kepentingan politik dominan yang berkuasa di Indramayu, yakni oligarki Yance, sehingga pada akhirnya tidak ikut menyelesaikan permasalahan dari relasi kuasa yang telah ada. Kebijakan atau program yang dijalankan oleh pemerintahan

Anna hanyalah melanjutkan program suaminya. Kondisi inilah yang memunculkan stereotip bahwa Anna hanyalah boneka, perpanjangan tangan suaminya dan masih berdiri diatas bayang-bayang suaminya, Yance. Kepemimpinan perempuan di daerah seringkali masih jauh dari merepresentasikan kepentingan perempuan, terutama yang selama ini berada di titik yang termarginalisasi (miskin, minim pendidikan, rentan mengalami kekerasan, dan terdomestikasi). Sebaliknya, kepemimpinan perempuan di daerah seringkali masih merupakan perpanjangan tangan dari kepentingan kekuasaan patriarkal yang telah ada sebelumnya.<sup>93</sup>

## Penutup

Kedua perempuan kepala daerah dengan faktor kekerabatan yang kuat dalam penelitian ini, memiliki berbagai posisi yang kompleks yaitu sebagai seorang istri, sebagai kepala daerah yang merupakan jabatan politik yang dituntut untuk profesional dan independen, serta posisinya sebagai bagian dari jejaring oligarki lokal yang mana kerabat laki-laki (ayah, suami) mereka memegang posisi kunci. Beragam lapisan posisi itu menunjukkan berbagai lapisan kesulitan yang harus dihadapi oleh perempuan kepala daerah dengan faktor kekerabatan yang kuat, yang membuatnya sulit menjaga independensi dalam menjalankan kerja pemerintahan dan kepemimpinan dengan efektif. Menguatnya jejaring oligarki politik di daerah, mencerminkan wajah lain dari demokrasi pasca reformasi yang terdesentralisasi. Selain itu, menguatnya jejaring oligarki politik di tingkat daerah juga mengancam tujuan besar dari gerakan demokrasi.

Dorongan dari Airin Rachmi Diany di Tangerang Selatan dan Anna Sophanah di Indramayu terkait demokratisasi lokal di daerahnya belumlah dilakukan secara optimal. Upaya mendorong demokratisasi lokal juga harus dibarangi dengan upaya memperbaiki keadaan lokal yang belum kondusif, seperti kondisi kesenjangan struktur sosial ekonomi penduduk di Tangerang Selatan dan rendahnya

---

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Indramayu, 2016.

<sup>90</sup> Wawancara Fathimah Fildzah Izzati dan Esty Ekawati dengan IS, birokrat Pemkab Indramayu, di kantor Disnakersostrans Kabupaten Indramayu pada 27 April 2016. Berdasarkan data Disnakersostrans, jumlah TKI ke luar negeri tahun 2014 tercatat 16.156 TKI dengan rincian 1.194 adalah laki-laki dan 14.962 adalah perempuan.

<sup>91</sup> Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun 2014, Bab III, hlm. 134.

<sup>92</sup> Lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun 2014, hlm. 104.

<sup>93</sup> Ani W. Soetjipto dan Shelly Adelina, *Suara dari Desa: Menuju Revitalisasi PKK*, (Tangerang: Marjin Kiri, 2013), hlm. 45-48.

Indeks Pembangunan Manusia di Indramayu. Rendahnya inisiatif dari kedua perempuan kepala daerah tersebut juga menyebabkan kepentingan praktis gender di daerahnya masing-masing belum optimal terpenuhi.

Wajah politik perempuan di Tangerang Selatan dan Indramayu, sejauh ini baru memperlihatkan ‘narasi simbolik perempuan’ (*symbolic narratives of women*) dan belum sampai pada ‘narasi substantif perempuan’ (*substantive narratives of women*). Meskipun demikian, ‘narasi simbolik perempuan’ ini tetap harus diapresiasi karena kehadiran mereka memberikan dorongan, imajinasi, dan inspirasi bagi kemunculan kiprah perempuan lainnya dalam politik. Para politisi perempuan harus terus didorong supaya kehadirannya pada panggung politik mampu mewujudkan ‘narasi substantif perempuan’ dalam politik.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Derichs, Claudia and Mark R. Thompson. *Dynasties and Female Political Leaders in Asia*. Berlin: LIT. 2013.
- Dewi, Kurniawati Hastuti. “Kepemimpinan Kyai dan Jawara di Banten: Pengaruhnya Terhadap *Good Governance*,” dalam Iwan Kusuma and Agus Salim (eds.), *Stakeholders dan Kebijakan Publik dalam Dinamika Politik dan Pembangunan Daerah Provinsi Banten*. Banten: Lembaga Strategis Pembangunan Banten. 2003.
- Hadiz, Vedi R. *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford, California: Stanford University Press. 2010.
- Moser, Caroline. “Gender Planning in the Third World: Meeting Practical and Strategic Needs,” dalam Rebecca Grant and Kathleen Newland (eds.), *Gender and International Relations*. Suffolk: Open University Press. 1991.
- O’Donnell, Guillermo. “Human Development, Human Rights, and Democracy,” dalam Guillermo O’Donnell, Jorge Vargas Cullell, Osvaldo M. Iazzetta (eds.), *The Quality of Democracy Theory and Applications*. USA: University of Notre Dame Press. 2004.
- Robison, Richard dan Vedi R Hadiz. *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in Age of Markets*. London: Routledge Curzon. 2004.
- Sidel, John T. “Bossism and Democracy in the Philippines, Thailand and Indonesia: Towards an Alternative Framework for the Study of Local Strongmen,” dalam John Harriss, Kristian Stokke, Olle Tornquist (eds.), *Politicising Democracy: The New Local Politics of Democratisation*. England: Palgrave. 2004.
- Statistik Daerah Kabupaten Indramayu 2014*. Indramayu: BPS Kabupaten Indramayu. 2014.
- Soetjipto, Ani W. dan Shelly Adelina, *Suara dari Desa: Menuju Revitalisasi PKK*. Tangerang: Marjin Kiri. 2013.
- Sudjana. *Metode Statistika*. Bandung: Tarsito. 2002.
- Yin, Robert K. *Case Study Research: Design and Methods*. Thousand Oaks, London, New Dehli: Sage Publications. 1994.

### Jurnal

- Aspinall, Edward. “Popular Agency and Interests in Indonesia’s Democratic Transition and Consolidation.” *Indonesia* 96 (2013): 102-103.
- Dewi, Kurniawati Hastuti. “Profiles, Statuses and Performance of Female Local Leaders: Impact Study of Direct Local Elections.” *Indonesian Feminist Journal Feminist Journal*, Vol.3, No. 1 (2015): 52-54.
- Ford, Michele dan Thomas B. Pepinsky. “Beyond Oligarchy? Critical Exchanges on Political Power and Material Inequality in Indonesia.” *Indonesia* 96 (2013): 4 [versi elektronik] diakses dari <http://www.jstor.org>, pada Januari 2016.
- Hadiz, Vedi R., “Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives,” *Development and Change* 35, No. 4 (2004): 697-718.
- Hadiz, Vedi R. dan Richard Robison. “Ekonomi Politik Oligarki dan Pengorganisasian Kembali Kekuasaan di Indonesia.” *Prisma*, Vol. 33, No. 1 (2014): 35-56.
- Hamid, Abdul. “A Family Matter: Political Corruption in Banten, Indonesia,” *Asian Politics and Policy* 6, No. 4 (2014).
- Jahan, Rounaq. “Women in South Asian Politics.” *Third World Quarterly*, Vol. 9, No. 3 (1987): hal. 852-853.
- Masaaki, Okamoto and Abdul Hamid. “Jawara in Power, 1999-2007.” *Indonesia* 86 (2008): 109-138.

Molyneux, Maxine. "Mobilization Without Emancipation? Women's Interests, the State, and Revolution in Nicaragua." *Feminist Studies*, Vol. 11, No. 2 (1985): 232-233.

O'Donnell, Guillermo A. "Why the Rule of Law." *Journal of Democracy*, Vol. 15, No. 4 (2004): 37 [versi online] <http://muse.jhu.edu/journals/jod/summary/v015/15.4odonnell.html>, diakses pada 14 Oktober 2013.

Richter, Linda K. "Exploring Theories of Female Leadership in South and Southeast Asia." *Pacific Affairs*, Vol.63, No. 4 (1990-1991): 528.

Thompson, Mark. R. "Asia's Hybrid Dynasties." *Asian Affairs*, Vol. 43, No. 2 (2012): hal. 216 [versi elektronik] diakses via the Australian National University <http://dx.doi.org/10.1080/03068374.2012.682366> diakses pada 17 Februari 2015.

\_\_\_\_\_. "Female Leadership of Democratic Transition in Asia." *Pacific Affairs*, Vol. 75, No. 4 (2002-2003): 538.

## Laporan Penelitian

Campbell, David F.J. "The Basic Concept for the Democracy Ranking of the Quality of Democracy". *Research Fellow*. University of Klagenfurt. 2008.

## Dokumen

Bappeda Kota Tangerang Selatan. "Informasi Status Kesejahteraan Rumah Tangga dan Individu di Kota Tangerang Selatan." Basis data terpadu untuk program perlindungan sosial Maret 2012.

Bappeda Kota Tangerang Selatan. "Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Tahun Anggaran 2013-2016 Pemkot Tangerang Selatan."

Data dari KPUD Indramayu. "Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Indramayu Model DB-KWK, DB1-KWK, DB2-KWK, dan Model DB5-KWK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu tahun 2015". diperoleh pada 27 April 2016.

Koalisi Masyarakat Sipil Kota Tangsel. "Koalisi Masyarakat Sipil Kota Tangerang Selatan Menuntut KPK untuk Mengusut Tuntas Kasus Korupsi di Kota Tangerang Selatan". Rilis Aksi pada 14 September 2015.

Lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun 2014.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun 2014. Bab III.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. "*Jalan Terjal Perempuan Kepala Daerah Terpilih: Potret Keterpilihan Perempuan dan Tantangan Lahirkan Kebijakan Pro Perempuan*".

Temuan "Kerugian Keuangan Daerah" oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Sepanjang Tahun 2009, 2010, dan 2011 (Dibawah Kepemimpinan: Dadang, M.Epid.).

## Website

AyoGitaBisa, 2013. "Pasar Rau dan Kisah Dinasti Korupsi Banten" dalam <http://www.ayogitabisa.com/inspirasi/pasar-rau-dan-kisah-dinasti-korupsi-banten.html>, diunduh pada 28 september 2016.

Ayu, Dwi, 2015. "Ini Profil dan Kiprah Hj Anna Sophanah untuk Indramayu" dalam <http://indramayu.cirebontrust.com/ini-profil-dan-kiprah-hj-anna-sophanah-untuk-indramayu.html>, diunduh pada 14 Mei 2016.

Buehler, Michael. "Indonesia: Countries at The Cross Roads" dalam <http://michaelbuehler.asia/wp-content/uploads/2012/06/BuehlerFH2010.pdf>, diunduh pada 29 September 2016.

Jariungu. "Daftar Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Periode 2009-2014" dalam [http://www.jariungu.com/parlemen\\_profil.php?pageNum\\_rsAnggotaParlemen1=0&totalRows\\_rsAnggotaParlemen1=50&idJenisParlemen=4&idParlemen=149&idKabKota=116& cariAnggotaParlemenDaerah=y&maxRows\\_rsAnggotaParlemen1=50](http://www.jariungu.com/parlemen_profil.php?pageNum_rsAnggotaParlemen1=0&totalRows_rsAnggotaParlemen1=50&idJenisParlemen=4&idParlemen=149&idKabKota=116& cariAnggotaParlemenDaerah=y&maxRows_rsAnggotaParlemen1=50), diunduh pada 15 September 2017.

\_\_\_\_\_. "Daftar Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Periode 2009-2014," dalam [http://jariungu.com/parlemen\\_profil.php?pageNum\\_rsAnggotaParlemen1=0&totalRows\\_rsAnggotaParlemen1=48&idJenisParlemen=5&idParlemen=514&idKabKota=488&cariAnggotaParlemenDaerah=y%27&maxRows\\_rsAnggotaParlemen1=48%27](http://jariungu.com/parlemen_profil.php?pageNum_rsAnggotaParlemen1=0&totalRows_rsAnggotaParlemen1=48&idJenisParlemen=5&idParlemen=514&idKabKota=488&cariAnggotaParlemenDaerah=y%27&maxRows_rsAnggotaParlemen1=48%27), diunduh pada 15 September 2017.

"Kuasa Gono Gini Mata Najwa." dalam <https://www.youtube.com/watch?v=HMM7uopd4iY>, diunduh pada 26 Oktober 2017.

"Ormas Indramayu: Bupati Anna Tak Layak Memimpin Indramayu," dalam <http://www.indramayupost.com/2012/02/ormas-indramayu-bupati-anna-tak-layak.html>, diakses pada 26 Oktober 2017.

Pilkada2015, “Hasil Hitung TPS Kota Tangerang Selatan: Rekapitulasi Data Sub Wilayah” dalam <http://pilkada2015.kpu.go.id/tangselkota>, diunduh pada 13 September 2017.

“Purposive Sampling” dalam <http://dissertation.laerd.com/purposive-sampling.php#>, diunduh pada 11 Februari 2016.

Republika, 2015, “MK Bolehkan Dinasti Politik,” dalam <http://www.republika.co.id/berita/koran/politik-koran/15/07/09/nr7nka31-mk-bolehkan-dinasti-politik>, diunduh pada 1 September 2015.

### **Focus Group Discussion (FGD)**

Keterangan AH. Akademisi di Serang dalam diskusi terfokus Tim Gender dan Politik Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI di Jakarta pada 8 Agustus 2016.

Keterangan AI. Aktifis NGO di Tangerang Selatan dalam diskusi terfokus Tim Gender dan Politik Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI di Tangerang Selatan pada 11 Mei 2016.

Keterangan AS. Aktifis NGO di Tangerang Selatan dalam diskusi terfokus Tim Gender dan Politik Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI di Tangerang Selatan pada 11 Mei 2016.

Keterangan NM. Aktifis NGO dalam diskusi terfokus Tim Gender dan Politik Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI di Tangerang Selatan pada 11 Mei 2016.

Keterangan OS. Politisi DPR RI dalam diskusi terfokus Tim Gender dan Politik Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI di Jakarta pada 6 Oktober 2016.

Keterangan RF. Pegawai Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam diskusi terfokus Tim Gender dan Politik Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI di Indramayu pada 25 April 2016.

Keterangan TH. Politisi DPRD Indramayu dalam diskusi terfokus Tim Gender dan Politik Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI di Indramayu pada 25 April 2016.

### **Wawancara**

Wawancara Esty Ekawati dan Fathimah Fildzah Izzati dengan HG. Pengusaha di Indramayu pada 24 April 2016.

Wawancara Esty Ekawati dan Fathimah Fildzah Izzati dengan TW. Aktifis perempuan di Indramayu pada 25 April 2016.

Wawancara Fathimah Fildzah Izzati dan Esty Ekawati dengan BL. Aktifis di Indramayu pada 27 April 2016.

Wawancara Fathimah Fildzah Izzati dan Esty Ekawati dengan IS. Birokrat Pemkab Indramayu di kantor Disnakersostrans Kabupaten Indramayu pada 27 April 2016.

Wawancara Fathimah Fildzah Izzati dan Esty Ekawati dengan K. Aktifis di Indramayu pada 25 April 2016.

Wawancara Fathimah Fildzah Izzati dan Esty Ekawati dengan O. Aktifis di Indramayu pada 27 April 2016.

Wawancara Fathimah Fildzah Izzati dengan R. Politisi DPRD Kabupaten Indramayu pada 22 April 2016.

Wawancara Fathimah Fildzah Izzati dan Esty Ekawati dengan T. Aktifis di Indramayu pada 25 April 2016.

Wawancara Kurniawati Hastuti Dewi dan Atika Nur Kusumaningtyas dengan A. Birokrat Pemkot Tangerang Selatan di kantor BPMPKB Tangerang Selatan pada 12 Mei 2016.

Wawancara Kurniawati Hastuti Dewi dan Atika Nur Kusumaningtyas dengan B. Penyelenggara Pilkada Tangerang Selatan di kantor KPUD Tangerang Selatan pada 11 Mei 2016.

Wawancara Kurniawati Hastuti Dewi dan Atika Nur Kusumaningtyas dengan MA. Birokrat Pemkot Tangerang Selatan di kantor BPMPKB Tangerang Selatan pada 12 Mei 2016.

Wawancara Kurniawati Hastuti Dewi dan Atika Nur Kusumaningtyas dengan Be. Aktifis NGO di Tangerang Selatan pada 13 Oktober 2016.

Wawancara Kurniawati Hastuti Dewi dan Atika Nur Kusumaningtyas dengan MS. Penyelenggara Pilkada Tangerang Selatan di kantor KPUD Tangerang Selatan pada 11 Mei 2016.

Wawancara Kurniawati Hastuti Dewi dengan R. Pengembang perumahan di Tangerang Selatan pada 16 Mei 2016.

Wawancara Kurniawati Hastuti Dewi dan Atika Nur Kusumaningtyas dengan T. Politisi di DPRD Tangerang Selatan di kantor DPRD Tangerang Selatan pada 12 Mei 2016.

## TENTANG PENULIS

### **Aisah Putri Budiatri**

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ia mengenyam pendidikan ilmu politik program sarjana di Universitas Indonesia dan program pasca-sarjana di Rockefeller College, State University of New York at Albany (SUNY at Albany). Beberapa tulisan akademik mengenai partai politik, parlemen, pemilu, konflik Papua, dan perempuan politik telah diterbitkan di dalam jurnal, buku dan dipresentasikan di dalam konferensi nasional dan internasional. Beberapa judul artikel yang telah diterbitkan diantaranya berjudul: “Pengawasan DPR RI 1999-2004: Mewakili Partai, Mengabaikan Rakyat?”, “Representasi Perempuan dalam Pusran Politik Papua,” “Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR RI dan DPRD),” dan beberapa artikel lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui email: [aisahputrib@gmail.com](mailto:aisahputrib@gmail.com).

### **Atika Nur Kusumaningtyas**

Penulis adalah peneliti Pusat Penelitian Politik – LIPI yang fokus menganalisis statistik untuk bidang ilmu politik Gelar sarjana statistik dan master statistik diperolehnya dari Universitas Padjajaran Bandung. Saat ini turut aktif terlibat dalam berbagai penelitian dengan tema kajian perempuan dan politik. Dapat dihubungi melalui email: [atika.nur.k@gmail.com](mailto:atika.nur.k@gmail.com)

### **Deasy Silvyia Sari**

Penulis adalah pengajar di jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran Bandung. Ia memperoleh Gelar master dari Ilmu Hubungan Internasional Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 2013. Ia menekuni studi hubungan internasional Penulis dapat dihubungi melalui email: [deasy.silvyia@unpad.ac.id](mailto:deasy.silvyia@unpad.ac.id)

### **Diandra Megaputri Mengko**

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik-LIPI. Pada tahun 2010, ia menamatkan kuliah (S-1) di Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Parahyangan Bandung. Selanjutnya menamatkan pendidikan master di Universitas Pertahanan pada tahun 2012. Pernah menjadi Peneliti pada Indonesia Center For Diplomacy, Democracy and Defense. Aktif menulis di berbagai jurnal ilmiah nasional dan Aktif menulis kolom opini juga di berbagai macam media massa, baik lokal maupun nasional. Ia menekuni studi pertahanan dan keamanan. Penulis dapat dihubungi melalui email: [diandramengko@yahoo.com](mailto:diandramengko@yahoo.com)

### **Firman Noor**

Penulis merupakan Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI). Fokus kajian peneliti yang diminatinya adalah partai politik, pemilu, ketewakilan politik, dan pemikiran politik. Selain aktif dalam kegiatan penelitian, dia menyempatkan diri untuk mengajar pada Departemen Ilmu Politik dan Program Pasca Sarjana Ilmu Politik FISIP UI. Menyelesaikan studi pada Departemen Ilmu Politik FISIP UI pada tahun 2000. Memperoleh Gelar Master of Art dari Faculty of Asian Studies Australian National University (ANU) dengan beasiswa Australian Development Scholarship (ADS). Pada saat kuliah di ANU dia sempat meraih penghargaan Anthony Reid Award sebagai mahasiswa dengan nilai terbaik di fakultasnya pada tahun 2007. Melanjutkan Studi S-3 di School of Social Sciences and Humanities, University of Exeter, Inggris dengan dukungan beasiswa dari kampusnya dan Program Beasiswa Unggulan DIKTI Kemendibud. Studi S-3 ditempuhnya dengan relatif singkat (2,5 tahun) dengan disertasi berjudul *Institutionalising Islamic Political Parties in Indonesia: A Study of Internal Fragmentation and Cohesion in the Post Soeharto Era (1998-2008)*. Tulisannya

telah pula tersebar di sejumlah jurnal ilmiah dan media cetak nasional seperti Republika, Seputar Indonesia, Harian Pelita, Media Indonesia, Koran Tempo, Kompas dan the Jakarta Post. Dapat dihubungi melalui email: f.noor7676@gmail.com

### **Gede Dwitya Arief Metera**

Penulis adalah kandidat doktor ilmu politik di Northwestern University Amerika Serikat. Menyelesaikan pendidikan sarjana bidang Bahasa Inggris di dan Master bidang kajian religi di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Pernah mengikuti Graduate Fellow di Asian Research Institute, National University of Singapore dan menjadi peneliti tamu di Pusat Penelitian Politik LIPI. . Dapat dihubungi melalui email : gdemetera2018@u.nortwestern.edu

### **Ismah Rustam**

Penulis adalah pengajar di jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Beliau memperoleh gelar sarjana hubungan internasional dari universitas mataram dan memperoleh Gelar master dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tahun 2013. Ia menekuni kajian hubungan internasional Penulis dapat dihubungi melalui email : ismah09@yahoo.com

### **Novie Lucky Andriyani**

Penulis adalah alumni pasca sarjana jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan memperoleh Gelar sarjana dari Universitas Negeri Surabaya. Ia menekuni studi hubungan internasional dan hak asasi manusia. Penulis dapat dihubungi melalui email: deasy.silvya@unpad.ac.id

### **Sarah Nuraini Siregar**

Penulis lahir di Jakarta, 30 April 1980 dan menetap di Jakarta. Sejak tahun 2004 sampai sekarang menjadi salah satu peneliti di bidang perkembangan politik nasional di Pusat Penelitian Politik-LIPI dengan konsentrasi studi tentang militer dan kepolisian. Menyelesaikan studi di tingkat Sarjana tahun 2002 dan Pasca Sarjana di jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 2005. Ia juga aktif sebagai salah satu staf pengajar di jurusan Ilmu Politik FISIP UI sejak tahun 2002 hingga sekarang. Beberapa tulisannya antara lain: Problematik Pengelolaan Keamanan dan Pertahanan di Wilayah Konflik (Aceh dan Papua), Model Kaji Ulang Pertahanan Indonesia: Supremasi Sipil dan Transformasi Pertahanan, Evaluasi Penerapan Darurat Militer di Aceh 2003-2004, dan Hubungan Sipil Militer Era Megawati. Dapat dihubungi melalui email: nurainisarah30@gmail.com.

### **Sri Yanuarti**

Penulis adalah peneliti Pusat Penelitian Politik - LIPI. Gelar sarjana ilmu politik diperolehnya dari Universitas Diponegoro Semarang. Beberapa kontribusi tulisannya telah diterbitkan, antara lain termuat di buku-buku Tentara yang Gelisah, Tentara Mendamba Mitra, Bila ABRI Berbisnis, Bila ABRI Menghendaki, Menata Negara, Pemilu 99 dan Kekerasan Politik, Militer dan Kekerasan Politik di Masa Orde Baru, dan lain-lain. Studi yang diminati adalah bidang politik domestik, khususnya berkaitan dengan kajian politik-militer. Dapat dihubungi melalui email: yanuc2000@yahoo.com

### **Yustina Trihoni Nalesti Dewi**

Penulis lahir di Yogyakarta, Indonesia tahun 1969. Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Indonesia dengan fokus kajian Hukum Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Internasional. Bekerja sebagai pengajar di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang. Pernah menulis buku dengan judul War Crime in International and National Law Perspectives tahun 2012 yang diterbitkan Rajawali Grasindo. Pernah diundang sebagai visiting scholar at Flinders Law School, Adelaide, Australia (2010 dan 2013) dan sebagai peneliti tamu di Norwegian Center for Human Rights, Oslo University, Norway tahun 2009. Beliau aktif menjadi pembicara dan narasumber tentang persoalan hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan. Penulis dapat dihubungi melalui email: trihoni@unika.ac.id

## PEDOMAN PENULISAN

1. Tulisan yang dimuat harus merupakan kajian ilmiah atas isu dan peristiwa yang berkaitan dengan politik dalam negeri dan internasional, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.
2. Tulisan merupakan karya sendiri, bukan saduran atau terjemahan dan belum pernah dipublikasikan dalam bentuk dan bahasa apa pun.
3. Tulisan mengandung data atau pemikiran yang baru dan orisinal.
4. Tulisan yang dimuat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi penulis yang bersangkutan.
5. Panjang naskah untuk artikel, 20-25 halaman A4, spasi 1,5; *book review*, 10-15 halaman A4, spasi 1,5.
6. Sistematika artikel hasil pemikiran/telaahan adalah: judul; nama penulis (tanpa gelar akademik); nama dan alamat institusi; alamat e-mail penulis; riwayat naskah; abstrak (maksimum 150 kata dalam bahasa Inggris dan 25 kata dalam bahasa Indonesia); kata kunci (4-5 kata kunci); pendahuluan; pembahasan (terbagi dalam beberapa sub-judul); penutup; daftar pustaka.

### JUDUL

#### Penulis

Nama Instansi

Alamat lengkap instansi penulis

Email penulis

Riwayat naskah

*Abstract: Abstract in English (max. 150 words)*

*Keywords: 4 – 5 words/ phrase*

**Abstrak:** Abstrak dalam bahasan Indonesia (maks. 250 kata)

**Kata Kunci:** 4 – 5 kata/ frasa

#### Pendahuluan

#### Pembahasan

#### Penutup

#### Daftar Pustaka



7. Sistematika artikel review buku (*book review*) adalah: judul; nama penulis (tanpa gelar akademik); nama dan alamat institusi; alamat e-mail penulis; riwayat naskah; judul buku; pengarang; penerbit; cetakan; tebal; abstrak (maksimum 150 kata dalam bahasa Inggris dan 25 kata dalam bahasa Indonesia); kata kunci (4-5 kata kunci); pendahuluan; pembahasan (terbagi dalam beberapa sub-judul); penutup; daftar pustaka.

## **JUDUL**

### **Penulis**

Nama Instansi

Alamat lengkap instansi penulis

Email penulis

Riwayat naskah

Judul buku

Pengarang

Penerbit

Tebal

Abstract: Abstract in English (max. 150 words)

Keywords: 4 – 5 words/ phrase

**Abstrak:** Abstrak dalam bahasan Indonesia (maks. 250 kata)

**Kata Kunci:** 4 – 5 kata/ frasa

### **Pendahuluan**

### **Pembahasan**

### **Penutup**

### **Daftar Pustaka**

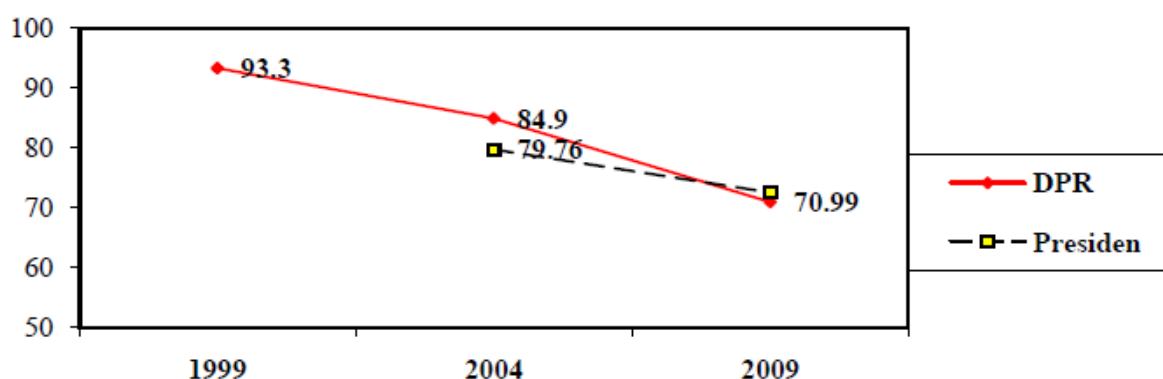
8. Tabel dan gambar, untuk tabel dan gambar (grafik) di dalam naskah harus diberi nomor urut.
  - a. Tabel atau gambar harus disertai judul. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar.
  - b. Sumber acuan tabel atau gambar dicantumkan di bawah tabel atau gambar.
  - c. Garis tabel yang dimunculkan hanya pada bagian header dan garis paling bawah tabel. Sedangkan untuk garis vertikal pemisah kolom tidak dimunculkan.

Contoh penyajian Tabel:

**Tabel 1.** Agenda-agenda Besar Konsolidasi

Domain	Vertikal	Horizontal
Internal	Pemantapan kepengurusan partai hingga level terendah Sosialisasi agenda politik	Pemantapan soliditas elite partai pada level DPP Pemantapan agenda politik menyambut pemilu
Eksternal	Pembangunan, pemeliharaan dan pemantapan dukungan masyarakat	Penjajagan koalisi dengan partai-partai lain dan kalangan institusi-institusi nonpolitik

Contoh penyajian Gambar/Grafik:



Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU)

**Grafik 2.** Tren Partisipasi dalam Pemilu

9. Perujukan sumber acuan menggunakan *footnotes*, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. **Format rujukan dari buku:** nama penulis, judul buku (*italic*), kurung buka, kota penerbitan, titik dua, nama penerbit, tahun terbit, kurung tutup, nomor halaman, titik. Contoh:  
Denny J.A., *Partai Politik Pun Berguguran*, (Yogyakarta: LKIS, 2006), hlm. v.
  - b. **Format rujukan dari buku (bunga rampai):** nama penulis artikel, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik”, dalam, nama editor buku, judul buku (*italic*), kurung buka, kota penerbitan, titik dua, nama penerbit, tahun terbit, kurung tutup, h., nomor halaman, titik. Contoh:  
Leonardo Morlino, “Political Parties and Democratic Consolidation in Southern Europe,” dalam Richard Gunther, P. Nikiforos Diamandouros dan Hans Jurgen Puhle (eds.), *The Politics of Democratic Consolidation: Southern Europe in Comparative Perspective*, (Baltimore MD: Johns Hopkins University Press, 1995), h. 315–388.
  - c. **Format rujukan dari jurnal:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” sumber artikel (*italic*), nomor atau edisi, tahun, h., nomor halaman, titik. Contoh:  
Lili Romli, “Peta Kekuatan Politik Setelah Reformasi dan Kecenderungan Koalisi Parpol,” *Jurnal Demokrasi dan HAM*, 2000, h. 124-125.

- d. Format rujukan dari makalah seminar/konferensi:** nama penulis, “judul makalah ditulis tegak dalam dua tanda petik,” makalah, nama/tema seminar, tempat pelaksanaan seminar, waktu, h., nomor halaman, titik. Contoh:

Andrea Ceron dan Alessandra Caterina Cremonesi, “*Politicians Go Social: Estimating Intra-Party Heterogeneity (and its Effect) through the Analysis of Social Media*,” makalah disampaikan pada NYU La Pietra Dialogues on Social Media and Political Participation, Florence, 10-11 Mei 2013, h 3.

- e. Format rujukan dari media online:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” nama situs, tanggal akses situs. Contoh:

Berita8, “Media Sosial bisa Perkuat Fungsi Partai Politik”, 18 April 2013, <http://www.berita8.com/berita/2013/04/MediaSosial-bisa-perkuat-fungsi-partai-politik>, diakses pada tanggal 18 Juni 2013.

- f. Format rujukan dari media massa:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” sumber media (*italic*), tanggal terbit, nomor halaman, titik. Contoh:

Degung Santikarma, “Monumen, Dokumen dan Kekerasan Massal,” Kompas, 1 Agustus 2003, h. 12.

10. Penulisan sumber Daftar Pustaka dibedakan menjadi: buku; jurnal; laporan dan makalah; surat kabar dan website. Daftar Pustaka dituliskan dengan urutan abjad nama belakang (*family name*). Format penulisan sebagai berikut:

- a. Format rujukan dari buku:**

Buku dengan satu pengarang: nama penulis; tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Caplan, Bryan. 2007. *The Myth of the Rational Voter: Why Democracies Choose Bad Policies*. New Jersey: Princeton University Press.

Buku dengan dua pengarang: nama penulis (dua orang); tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Aspinall, E. dan M. Mietzner. 2010. *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS Publishing.

Buku dengan lebih dari dua pengarang: nama penulis (et al); tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Ananta, Aris, et al., 2004. *Indonesian Electoral Behaviour: A Statistical Perspective*. Singapore: ISEAS Publishing.

Artikel/tulisan dalam buku: nama penulis; tahun terbit; judul tulisan; dalam nama editor; judul buku; tahun terbit; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Qodari, M. 2010. “The Professionalisation of Politics: The Growing Role of Polling Organisation and Political Consultants”, dalam Aspinall, E. dan M. Mietzner (eds.). *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS Publishing.

- b. Format rujukan dari jurnal:** nama penulis; tahun; judul artikel; nama jurnal; volume jurnal; nomor jurnal; nomor halaman. Contoh:

Ufen, A. 2008. "From Aliran to Dealignment: Political Parties in post-Suharto Indonesia". *South East Asia Research*, 16 (1): 5-41.

**c. Format rujukan dari laporan dan makalah:**

Laporan penelitian: nama penulis; tahun terbit; judul laporan; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Mainwaring, Scott, 1998. "Rethinking Party Systems Theory In The Third Wave Of Democratization: The Importance of Party System Institutionalization." *Working Paper* #260 - October 1998, Kellogg Institute.

Makalah seminar: nama penulis; tahun terbit; judul makalah; nama kegiatan seminar; waktu pelaksanaan kegiatan seminar; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Ceron, Andrea dan Alessandra Caterina Cremonesi. 2013. "Politicians Go Social: Estimating Intra-Party Heterogeneity (and its Effect) through the Analysis of Social Media". Paper disampaikan pada NYU La Pietra Dialogues on Social Media and Political Participation, Florence, 10-11 Mei 2013.

**d. Format rujukan dari surat kabar dan website**

Artikel media massa: nama penulis; tahun terbit; judul artikel; nama media massa; tanggal terbit; nomor halaman. Contoh:

Wahid, Sholahuddin. 1998. "Di Balik Berdirinya Partai-Partai di Kalangan NU," *Republika*, 3 Oktober.

Artikel online: nama penulis/institusi; tahun terbit; judul artikel, alamat websites; waktu unduh. Contoh:

Aspinall, Edward, "The Taming of Ethnic Conflict in Indonesia", dalam <http://www.eastasiaforum.org/2010/08/05/the-taming-of-ethnic-conflict>, diunduh pada 28 November 2013.

**11. Pengiriman Artikel:**

- ✓ Naskah dikirim dalam bentuk *printout* sebanyak 2 eksemplar beserta *softcopy* ke alamat redaksi atau dapat dikirimkan melalui email redaksi ([penerbitan.p2p@gmail.com](mailto:penerbitan.p2p@gmail.com)).
- ✓ Redaksi memberikan honorarium untuk setiap artikel yang dimuat.
- ✓ Artikel yang diterima setelah *deadline* akan dipertimbangkan untuk dimuat pada edisi berikutnya.
- ✓ Artikel dapat dikirimkan melalui website e-journal dengan alamat <http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jpp> dengan cara mendaftar secara *online*.

**12. Alamat Jurnal Penelitian Politik:**

P2P-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III dan XI  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710  
Telp/Fax. (021) 520 7118

**13. Langganan:**

Harga Pengganti ongkos cetak Rp.75.000,- per eksemplar sudah termasuk ongkos kirim biasa. Untuk berlangganan dan surat menyurat langsung hubungi bagian sirkulasi Redaksi Jurnal Penelitian Politik.

# Informasi Hasil Penelitian Terpilih

